



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

2022 | **LAPORAN AUDITED** | **KEUANGAN**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET**

ꦒꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦭꦏꦺꦴꦁꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)**

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 (Audited) ini dapat kami sajikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, mengamanatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (LK BPKA) DIY Tahun Anggaran 2022 (Audited) ini merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan pada BPKA (induk), Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kota Yogyakarta, KPPD di Kabupaten Bantul, KPPD di Kabupaten Gunungkidul, KPPD di Kabupaten Kulon Progo, dan KPPD di Kabupaten Sleman. Laporan Keuangan masing-masing unit kerja tersebut berasal dari data jurnal dan buku besar yang merupakan output dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh BPKA yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

PENDAPATAN

Anggaran	Rp	5.407.663.603.049,00
Realisasi	Rp	<u>5.433.638.565.323,91</u>
Selisih lebih dari anggaran atau	Rp	25.974.962.274,91 100,48 %

BELANJA

Anggaran	Rp	1.500.550.634.235,00
Realisasi	Rp	<u>1.414.087.131.358,51</u>
Selisih kurang dari anggaran atau	Rp	(86.463.502.876,49) 94,23%

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BPKA untuk kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKA dalam periode Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut :

Pendapatan-LO	Rp	5.577.379.989.123,38
Beban	Rp	<u>1.412.373.353.076,44</u>
Surplus	Rp	4.165.006.636.046,94
Surplus Non Operasional-LO	Rp	619.920.633,94
Defisit Non Operasional-LO	Rp	<u>(5.758.844.097,66)</u>
Surplus/Defisit-LO	Rp	4.159.867.712.583,22

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan ringkasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp	3.156.556.769.719,74
Surplus/Defisit -LO	Rp	4.159.867.712.583,22
RK PPKD	Rp	(3.953.446.386.847,85)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	<u>24.377.193.005,29</u>
Ekuitas Akhir	Rp	3.387.355.288.460,40

4. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Aset BPKA per 31 Desember 2022 adalah	Rp	3.402.608.747.152,61
Terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp	415.431.968.496,00
Investasi Jangka Panjang sebesar	Rp	1.955.017.607.030,46
Aset Tetap sebesar	Rp	862.374.245.423,62
Aset Lainnya sebesar	Rp.	169.784.926.202,53
Jumlah Kewajiban BPKA per 31 Desember 2022 adalah	Rp	15.253.458.692,21
Merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar	Rp	15.253.458.692,21
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah	Rp	3.387.355.288.460,40
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022	Rp	3.402.608.747.152,61

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam Laporan Realiasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Demikian laporan keuangan ini dibuat, semoga merupakan penjabaran dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Desember 2022
Mengetahui,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LRA Tahun 2022 BPKA Gabungan.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL	
LO Tahun 2022 BPKA Gabungan.....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
LPE Tahun 2022 BPKA Gabungan	viii
NERACA	
Neraca Tahun 2022 BPKA Gabungan	ix
Catatan atas Laporan Keuangan	1
PENUTUP	95

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Kepala

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦲꦨꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ
ꦢꦤꦺꦴꦫꦤ꧀ꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(AUDITED)

Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	5.407.663.603.049,00	5.433.638.565.323,91	100,48	5.622.166.227.521,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.113.523.015.707,00	2.165.875.030.591,19	102,47	1.819.988.993.060,24
4.1.01	Pajak Daerah	1.924.613.524.517,00	1.951.267.446.232,85	101,38	1.688.443.843.923,00
4.1.02	Retribusi Daerah	874.194.575,00	870.571.800,00	99,58	1.020.834.115,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	102,00	96.338.516.913,54
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	81.926.521.502,00	105.497.499.242,46	128,77	34.185.798.108,69
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.113.523.015.707,00	2.165.875.030.591,19	102,47	1.819.988.993.060,24
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	99,11	3.794.855.660.531,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.028.793.852,00	3.256.850.196.484,00	99,11	3.794.050.615.221,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490,00	871.293.490,00	100,00	805.045.310,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	7.240.500.000,00	10.042.044.758,71	138,69	7.321.573.929,77
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	103,37	7.141.630.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.240.500.000,00	10.042.044.758,71	138,69	7.321.573.929,77
	JUMLAH PENDAPATAN	5.407.663.603.049,00	5.433.638.565.323,91	100,48	5.622.166.227.521,01
5	BELANJA DAERAH	1.500.550.634.235,00	1.414.087.131.358,51	94,23	1.460.497.516.112,71
5.1	BELANJA OPERASI	117.482.801.515,00	110.666.470.954,00	94,19	157.872.694.090,20
5.1.01	Belanja Pegawai	81.163.193.644,00	77.685.513.435,00	95,71	129.044.649.565,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.319.607.871,00	32.980.957.519,00	90,80	28.828.044.525,20
	JUMLAH BELANJA OPERASI	117.482.801.515,00	110.666.470.954,00	94,19	157.872.694.090,20
5.2	BELANJA MODAL	4.617.323.710,00	4.353.669.090,00	94,28	2.549.120.030,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.330.363.710,00	4.068.274.410,00	93,94	1.522.408.530,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.960.000,00	285.394.680,00	99,45	140.984.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	885.727.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.617.323.710,00	4.353.669.090,00	94,28	2.549.120.030,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,16	53.316.587.701,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,16	53.316.587.701,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,16	53.316.587.701,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.315.904.576.141,00	1.293.331.949.761,51	98,28	1.246.759.114.291,51
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	839.016.298.042,00	839.016.298.042,00	100,00	713.118.316.167,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	476.888.278.099,00	454.315.651.719,51	95,26	533.640.798.124,51
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.315.904.576.141,00	1.293.331.949.761,51	98,28	1.246.759.114.291,51
	JUMLAH BELANJA	1.500.550.634.235,00	1.414.087.131.358,51	94,23	1.460.497.516.112,71
	SURPLUS/DEFISIT	3.907.112.968.814,00	4.019.551.433.965,40	102,87	4.161.668.711.408,30
6	PEMBIAYAAN DAERAH	390.811.837.414,00	381.012.337.214,50	97,49	381.560.546.739,46
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	564.487.394.414,00	554.687.337.214,50	98,26	494.060.546.739,46
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	554.487.394.414,00	554.487.394.414,50	100,00	484.453.213.139,46
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	199.942.800,00	1,99	9.607.333.600,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	564.487.394.414,00	554.687.337.214,50	98,26	494.060.546.739,46
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	173.675.557.000,00	173.675.000.000,00	99,99	112.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	173.675.557.000,00	173.675.000.000,00	99,99	112.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	173.675.557.000,00	173.675.000.000,00	99,99	112.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	390.811.837.414,00	381.012.337.214,50	97,49	381.560.546.739,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	4.297.924.806.228,00	4.400.563.771.179,90	102,38	4.543.229.258.147,76

Yogyakarta, 31 Desember 2023
Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc
NIP. 196802151994031005



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦲꦨꦧꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ
ꦢꦫꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦿꦪꦏꦂꦠ

***LAPORAN OPERASIONAL
(AUDITED)***

Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022



Kode Rekening	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
7	PENDAPATAN	5.577.379.989.123,38	6.497.725.135.915,01	(920.345.146.791,62)	(14,16)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.250.141.729.947,66	1.875.279.627.463,44	374.862.102.484,22	19,98
7.1.01	Pajak Daerah-LO	1.951.260.431.032,85	1.688.402.302.123,00	262.858.128.909,85	15,56
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	859.677.831,97	972.291.963,55	(112.614.131,58)	(11,58)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	199.891.066.543,91	153.233.086.264,59	46.657.980.279,32	30,44
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	98.130.554.538,91	32.671.947.112,30	65.458.607.426,61	200,35
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.250.141.729.947,66	1.875.279.627.463,44	374.862.102.484,22	19,98
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.269.446.186.331,00	3.794.855.660.531,00	(525.409.474.200,00)	(13,84)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	3.268.574.892.841,00	3.794.050.615.221,00	(525.475.722.380,00)	(13,84)
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	871.293.490,00	805.045.310,00	66.248.180,00	8,22
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	871.293.490,00	805.045.310,00	66.248.180,00	8,22
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.269.446.186.331,00	3.794.855.660.531,00	(525.409.474.200,00)	(13,84)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	57.792.072.844,72	827.589.847.920,57	(769.797.775.075,85)	(93,01)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	55.234.623.086,00	827.409.903.990,80	(772.175.280.904,80)	(93,32)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	2.557.449.758,71	179.943.929,77	2.377.505.828,94	1.321,24
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	57.792.072.844,72	827.589.847.920,57	(769.797.775.075,85)	(93,01)
	JUMLAH PENDAPATAN	5.577.379.989.123,38	6.497.725.135.915,01	(920.345.146.791,62)	(14,16)
8	BEBAN	1.412.373.353.076,44	1.439.696.778.388,13	(27.323.425.311,69)	(1,89)
8.1	BEBAN OPERASI	110.136.768.046,48	164.551.448.794,11	(54.414.680.747,62)	(33,06)
8.1.01	Beban Pegawai	77.685.513.435,00	129.044.649.565,00	(51.359.136.130,00)	(39,79)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	31.236.940.352,49	28.866.361.684,11	2.370.578.668,37	8,21
8.1.05	Beban Hibah	-	6.594.865.625,00	(6.594.865.625,00)	(100,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.214.314.259,00	45.571.920,00	1.168.742.339,00	2.564,61
	JUMLAH BEBAN OPERASI	110.136.768.046,48	164.551.448.794,11	(54.414.680.747,62)	(33,06)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	25.962.643.911,44	21.435.219.688,50	4.527.424.222,93	21,12
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	25.962.643.911,44	21.435.219.688,50	4.527.424.222,93	21,12
8.3	BEBAN TRANSFER	1.276.265.566.587,51	1.249.746.537.055,51	26.519.029.532,00	2,12
8.3.01	Beban Bagi Hasil	821.949.914.868,00	716.105.738.931,00	105.844.175.937,00	14,78
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	454.315.651.719,51	533.640.798.124,51	(79.325.146.405,00)	(14,86)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	1.276.265.566.587,51	1.249.746.537.055,51	26.519.029.532,00	2,12
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	8.374.531,00	3.963.572.850,00	(3.955.198.319,00)	(99,78)
8.2.01	Beban Tidak Terduga	8.374.531,00	3.963.572.850,00	(3.955.198.319,00)	(99,78)
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	8.374.531,00	3.963.572.850,00	(3.955.198.319,00)	(99,78)
	JUMLAH BEBAN	1.412.373.353.076,44	1.439.696.778.388,13	(27.323.425.311,69)	(1,89)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	4.165.006.636.046,94	5.058.028.357.526,88	(893.021.721.479,94)	(17,65)
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	619.920.633,94	662.451.787,00	(42.531.153,05)	(6,42)
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	619.920.633,94	662.451.787,00	(42.531.153,05)	(6,42)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	619.920.633,94	662.451.787,00	(42.531.153,05)	(6,42)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.758.844.097,66	1.382.124.860,82	4.376.719.236,84	316,66
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.758.844.097,66	1.382.124.860,82	4.376.719.236,84	316,66
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.758.844.097,66	1.382.124.860,82	4.376.719.236,84	316,66
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(5.138.923.463,71)	(719.673.073,82)	(4.419.250.389,89)	614,06
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	4.159.867.712.583,22	5.057.308.684.453,05	(897.440.971.869,83)	(17,74)
8.5	BEBAN LUAR BIASA				
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO	4.159.867.712.583,22	5.057.308.684.453,05	(897.440.971.869,83)	(17,74)

Yogyakarta, 31 Desember 2022
Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc
NIP.196802151994031005



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦲꦨꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦁꦏꦸꦁꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ
ꦢꦤꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦿꦪꦏꦂꦠ

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(AUDITED)

Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022



URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	3.156.556.769.719,73	3.235.468.657.069,03
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	4.159.867.712.583,21	5.057.308.684.453,05
RK PPKD	(3.953.446.386.847,85)	(4.867.801.675.261,86)
RK SKPD	0,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	24.377.193.005,29	(268.418.896.540,49)
EKUITAS AKHIR	3.387.355.288.460,39	3.156.556.769.719,73

Yogyakarta, 31 Desember 2022
Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc
NIP.196802151994031005



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦲꦨꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ
ꦢꦤꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

***NERACA
(AUDITED)***

Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2022
1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022



Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	3.402.608.747.152,61	3.183.073.464.246,90
1.1	ASET LANCAR	415.431.968.496,00	517.807.489.983,72
1.1.01	Kas dan Setara Kas	411.828.641.051,76	513.471.984.112,22
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	122.616.000,00	129.631.200,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.616.065.508,97	2.750.497.613,55
1.1.10	Penyisihan Piutang	(2.706.824.063,55)	(1.960.981.651,05)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	706.718.283,40	672.352.262,00
1.1.12	Persediaan	2.864.751.715,41	2.744.006.447,00
	JUMLAH ASET LANCAR	415.431.968.496,00	517.807.489.983,72
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.955.017.607.030,46	1.701.482.917.570,70
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.522.554.473,60	5.054.340.970,10
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	4.522.554.473,60	5.054.340.970,10
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	1.950.495.052.556,86	1.696.428.576.600,60
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	1.950.495.052.556,86	1.696.428.576.600,60
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1.955.017.607.030,46	1.701.482.917.570,70
1.3	ASET TETAP	862.374.245.423,62	861.480.492.934,72
1.3.01	Tanah	623.892.994.353,00	691.358.769.393,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	137.711.134.229,40	91.823.504.813,40
1.3.03	Gedung dan Bangunan	169.983.905.984,00	173.098.787.975,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.391.984.618,10	5.855.767.351,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	508.360.692,00	234.400.692,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.466.855.900,00	1.545.502.700,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(129.580.990.352,87)	(102.436.239.989,68)
	JUMLAH ASET TETAP	862.374.245.423,62	861.480.492.934,72
1.5	ASET LAINNYA	169.784.926.202,53	102.302.563.757,76
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	186.527.877.398,00	122.137.028.398,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	6.562.169.116,00	6.173.326.816,00
1.5.04	Aset Lain-lain	142.378.336,76	116.126.336,76
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(35.172.195.005,22)	(26.123.917.793,00)
1.5.07	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	11.724.696.357,00	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	169.784.926.202,53	102.302.563.757,76
	JUMLAH ASET	3.402.608.747.152,61	3.183.073.464.246,90
2	KEWAJIBAN	15.253.458.692,21	26.516.694.527,16
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.253.458.692,22	26.516.694.527,16
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	7.409.029.724,21	1.567.336.917,16
2.1.06	Utang Belanja	7.844.428.968,00	24.949.357.610,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.253.458.692,22	26.516.694.527,17
	JUMLAH KEWAJIBAN	15.253.458.692,21	26.516.694.527,17
3	EKUITAS	3.387.355.288.460,40	3.156.556.769.719,73
3.1	EKUITAS	3.387.355.288.460,40	3.156.556.769.719,73
3.1.01	Ekuitas	7.340.801.675.308,25	8.024.358.444.981,59
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(3.953.446.386.847,85)	(4.867.801.675.261,86)
	JUMLAH EKUITAS	3.387.355.288.460,40	3.156.556.769.719,73
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.402.608.747.152,61	3.183.073.464.246,90

Yogyakarta, 31 Desember 2022
Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc
NIP.196802151994031005



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ꦲꦨꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦁꦏꦸꦁꦁꦢꦤꦲꦱꦺꦠ
ꦢꦤꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦿꦏꦂꦠ

***CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED)
Tahun Anggaran 2022***



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂක ව්‍යවස්ථාපන සභාව
பாதுகாப்பு வகை
பாதுகாப்பு வகை

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦏꦸꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦢꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124);



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 64).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1. Pendapatan-LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Aset
 - 3.1.4. Kewajiban
 - 3.1.5. Ekuitas
 - 3.1.6. Pendapatan-LO
 - 3.1.7. Beban
 - 3.1.8. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab V. Penutup



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආර්ථික විකල්ප කළමනාකරණ සේවකර්ම මණ්ඩලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB II

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BPKA

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
BELANJA DAERAH	1.500.550.634.235,00	1.414.087.131.358,51	94,23	85.948.992.278,37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.298.485.389,00	95.505.942.025,00	95,22	4.792.249.765,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.138.000,00	22.430.000,00	96,94	708.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	33.973.000,00	32.612.000,00	95,99	1.361.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.007.000,00	17.447.000,00	96,89	560.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.833.073.644,00	77.359.813.435,00	95,70	3.473.260.209,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.200.000,00	232.580.000,00	98,89	2.620.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.715.500,00	16.679.500,00	99,78	36.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.240.500,00	11.116.500,00	98,90	124.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	94.920.000,00	93.120.000,00	98,10	1.800.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	122.997.000,00	104.153.500,00	84,68	18.843.500,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.078.000,00	389.833.137,00	93,02	29.244.863,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	246.097.000,00	220.736.648,00	89,69	25.360.352,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.729.200,00	51.568.000,00	97,80	1.161.200,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	308.970.800,00	229.238.750,00	74,19	79.732.050,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.792.000,00	46.168.000,00	94,62	2.624.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508.066.000,00	471.033.915,00	92,71	37.032.085,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.386.000,00	52.048.000,00	95,70	2.338.000,00
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	54.978.000,00	54.627.080,00	99,36	350.920,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	636.290.000,00	633.500.000,00	99,56	2.790.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.000.000,00	217.000.000,00	0,00	230.000.000,00
Pengadaan Mebel	52.885.000,00	48.620.000,00	91,94	4.265.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.736.384.910,00	1.687.725.145,00	97,20	48.659.765,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.280.000,00	206.688.200,00	98,64	2.829.028,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1.596.796.800,00	1.413.482.490,00	88,52	183.314.310,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.977.000,00	22.981.500,00	62,15	13.995.500,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.631.337.946,00	3.047.190.829,00	83,91	584.147.117,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ບ່າຍພັດລັດຖະບານກະຊວງບ່າຍພັດລັດຖະບານ ບ່າຍພັດລັດຖະບານ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	445.055.000,00	443.326.000,00	99,61	1.729.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.398.298.800,00	4.367.224.842,00	99,29	31.073.958,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.590.000,00	6.714.082,00	70,01	2.875.918,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	809.022.289,00	712.917.713,00	88,12	96.104.576,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.391.510.000,00	1.325.055.850,00	95,22	66.454.150,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.406.625.000,00	1.344.766.409,00	95,76	59.621.363,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	628.071.000,00	623.543.500,00	99,33	4.233.901,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.385.130.562.010,00	1.304.661.637.890,51	94,23	79.954.707.121,37
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	357.190.000,00	315.604.243,00	88,36	41.585.757,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	357.190.000,00	310.866.494,00	87,03	46.323.506,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	26.793.000,00	16.605.005,00	61,98	10.187.995,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	29.368.000,00	21.450.000,00	73,04	7.918.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	644.299.000,00	626.371.000,00	97,22	17.928.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.160.543.000,00	851.981.512,00	73,41	308.561.488,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.015.303.000,00	876.335.322,00	86,31	138.967.678,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	134.310.000,00	43.636.400,00	32,49	90.673.600,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	168.625.000,00	164.219.000,00	97,39	4.406.000,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	167.240.000,00	163.145.000,00	97,55	4.095.000,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	172.605.000,00	166.945.700,00	96,72	5.659.300,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	5.064.000,00	3.863.500,00	76,29	1.200.500,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිය පිළිගනු ලබන පාලන ක්‍රම පදනමක් මත පදනම් වූ
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	98.090.000,00	90.424.000,00	92,18	7.666.000,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	239.998.000,00	214.289.000,00	89,29	25.709.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	115.643.000,00	108.548.000,00	93,86	7.095.000,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23.495.000,00	18.806.750,00	80,05	4.688.250,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	424.305.750,00	414.155.750,00	97,61	10.150.000,00
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.975.000,00	4.975.000,00	100,00	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8.871.000,00	8.284.000,00	93,38	587.000,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	233.081.250,00	201.390.000,00	86,40	31.691.250,00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	48.419.000,00	27.204.000,00	56,18	21.215.000,00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	33.616.500,00	19.045.500,00	56,66	14.571.000,00
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1.211.028.500,00	926.501.400,00	76,51	284.527.100,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	476.888.278.099,00	454.315.651.719,51	95,37	22.058.409.381,37
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,17	56.810.891.316,00
Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	839.016.298.042,00	839.016.298.042,00	100,00	-
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.545.127.500,00	3.963.731.956,00	87,21	581.395.544,00
Penyusunan Standar Belanja	382.640.000,00	368.582.000,00	96,33	14.058.000,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	76.211.000,00	73.060.650,00	95,87	3.150.350,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	233.362.000,00	218.944.650,00	93,82	14.417.350,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.983.439.500,00	2.499.216.606,00	83,77	484.222.894,00
Penilaian Barang Milik Daerah	576.062.000,00	537.254.750,00	93,26	38.807.250,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	293.413.000,00	266.673.300,00	90,89	26.739.700,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
பொது நிர்வாகப் பகுதி நிர்வாக அமைப்பு

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	REALISASI	%	SISA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.576.459.336,00	9.955.819.488,00	94,13	620.639.848,00
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.957.969.000,00	1.749.835.693,00	89,37	208.133.307,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	96.076.000,00	94.511.000,00	98,37	1.565.000,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	573.436.000,00	563.364.000,00	98,24	10.072.000,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.222.333.400,00	2.189.422.797,00	98,52	32.910.603,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.726.644.936,00	5.358.685.998,00	93,57	367.958.938,00

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan Daerah BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 5.407.663.603.049,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.433.638.565.323,91 atau 100,48%. Belanja Daerah BPKA dianggarkan sebesar Rp 1.500.550.634.235,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.414.087.131.358,51 atau 94,23%.

Secara umum target pendapatan dan kinerja dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala yang material dihadapi oleh BPKA.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BPKA

3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan BPKA

	2022	2021 (audited)
3.1.1. <u>Pendapatan Daerah</u>	<u>Rp 5.433.638.565.323,91</u>	<u>Rp 5.622.166.227.521,01</u>

Pendapatan Daerah BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 5.407.663.603.049,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.433.638.565.323,91 atau 100,48% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 188.527.662.197,10) atau (3,35%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 5.622.166.227.521,01 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1. <u>Pendapatan Asli Daerah</u>	<u>Rp 2.165.875.030.591,19</u>	<u>Rp 1.819.988.993.060,24</u>
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 2.113.523.015.707,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.165.875.030.591,19 atau 102,48% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 345.886.037.530,95 atau 19,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.819.988.993.060,24 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1.1. <u>Pajak Daerah</u>	<u>Rp 1.951.267.446.232,85</u>	<u>Rp 1.688.443.843.923,00</u>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.924.613.524.517,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.951.267.446.232,85 atau 101,38% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 262.823.602.309,85 atau 15,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 1.688.443.843.923,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PAJAK DAERAH				
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	933.917.926.448,00	953.422.127.400,00	102,09	874.731.430.750,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	397.829.181.500,00	404.968.406.500,00	101,79	362.977.665.400,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	302.160.938.052,00	302.161.948.065,85	100,00	232.244.843.244,00
Pajak Air Permukaan	1.113.998.226,00	1.123.483.976,00	100,85	1.301.742.775,00
Pajak Rokok	289.591.480.291,00	289.591.480.291,00	100,00	217.188.161.754,00
JUMLAH (Rp)	1.924.613.524.517,00	1.951.267.446.232,85	101,38	1.688.443.843.923,00

Terjadi kenaikan realisasi Pajak Daerah 2022 sebesar 15,57% karena adanya peningkatan realisasi dari masing-masing objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor naik sebesar 9% karena proses pendataan dan penagihan dapat dilaksanakan dengan maksimal seiring dengan melandainya pandemi Covid-19 yang membuat pulihnya perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Selain itu, terdapat banyak inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah, salah satunya dengan menambah kanal-kanal pembayaran pajak. Sosialisasi kepada wajib pajak juga dilakukan secara intensif baik melalui radio, televisi, baliho, media cetak, maupun tatap muka.

- Realisasi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor naik sebesar 11,57% disebabkan oleh adanya komunikasi yang intensif dengan dealer otomotif dan pulihnya perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca pandemi Covid-19.
- Realisasi pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor naik sebesar 30,10% karena adanya komunikasi yang intensif dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM juga dengan kelonggaran pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan kenaikan mobilitas penduduk sejak awal tahun 2022. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Oktober tahun 2022 juga menyebabkan kenaikan pajak PBBKB.
- Realisasi Pajak Air Permukaan mengalami penurunan sebesar (13,69%) karena penyesuaian penghitungan Nilai Air Permukaan dengan peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.
- Realisasi pendapatan Pajak Rokok naik sebesar 33,34% karena adanya kenaikan jumlah penduduk penerimaan cukai hasil tembakau.

Tabel III.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	40.526.115.100,00	41.338.049.000,00	102,00	40.355.467.975,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	62.744.066.400,00	63.865.104.400,00	101,79	57.908.571.850,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	449.320.662.800,00	457.825.730.800,00	101,89	415.454.066.300,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	5.372.708.600,00	5.482.098.000,00	102,04	4.683.729.300,00
PKB-Mobil Bus-Bus	1.349.029.300,00	1.355.469.300,00	100,48	1.121.203.600,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	50.692.207.400,00	51.603.029.200,00	101,8	47.509.516.300,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	41.395.794.500,00	42.141.970.100,00	101,8	39.477.997.100,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	282.517.342.348,00	289.810.676.600,00	102,58	268.220.878.325,00
JUMLAH (Rp)	933.917.926.448,00	953.422.127.400,00	102,09	874.731.430.750,00

Tabel III.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	5.973.517.000,00	6.101.737.000,00	102,15	5.735.497.700,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	29.275.103.300,00	29.829.513.300,00	101,89	29.705.876.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	183.291.730.600,00	186.804.570.600,00	101,92	156.558.359.300,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	2.049.830.000,00	2.050.120.000,00	100,01	948.439.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	432.525.000,00	432.525.000,00	100	431.240.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	19.782.121.300,00	19.971.211.300,00	100,96	19.495.561.800,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	10.861.398.000,00	11.030.918.000,00	101,56	12.718.810.400,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	146.162.956.300,00	148.747.811.300,00	101,77	137.383.881.200,00
JUMLAH (Rp)	397.829.181.500,00	404.968.406.500,00	101,79	362.977.665.400,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.4
Rincian Pajak Daerah per Unit Kerja

UNIT KERJA	PKB	BBNKB	JUMLAH
KPPD Kota	180.699.941.700,00	77.949.077.000,00	258.649.018.700,00
KPPD Bantul	223.232.787.400,00	93.615.721.000,00	316.848.508.400,00
KPPD Gunungkidul	81.283.685.300,00	29.363.013.300,00	110.646.698.600,00
KPPD Kulon Progo	70.996.931.400,00	26.652.590.500,00	97.649.521.900,00
KPPD Sleman	397.208.781.600,00	177.388.004.700,00	574.596.786.300,00
JUMLAH (Rp)	953.422.127.400,00	404.968.406.500,00	1.358.390.533.900,00

Jumlah Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 1.915.796 unit untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan 155.096 unit untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Wajib pungut untuk Pajak Bahan Bakar adalah Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo, Exxon Mobile, PT Petrolina Niaga Energi, PT Elnusa Petrofine, dan PT Energi Hijau Samoedra Bersaudara. Dasar Pemungutan Pajak Air Permukaan adalah Pergub No 54 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan.

Tabel III.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	254.946.576.858,00	254.946.576.858,41	100,00	196.778.843.244,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	47.214.361.194,00	47.215.371.207,44	100,00	35.466.129.747,00
JUMLAH (Rp)	302.160.938.052,00	302.161.948.065,85	100,00	232.244.843.244,00

- PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp 254.946.576.858,41 merupakan pendapatan pajak bahan bakar bensin Pertalite sebesar Rp 184.905.920.035,00; Pertamax sebesar Rp 67.509.526.070,41; dan Pertamax Turbo sebesar Rp 2.531.130.753,00.
- PBBKB-Bahan Bakar Solar sebesar Rp 47.215.371.207,44 merupakan pendapatan pajak bahan bakar solar Dexlite sebesar Rp 4.723.310.814,00; Solar sebesar Rp 48.806.385,47; Bio Solar sebesar Rp 39.105.514.980,81; dan Pertamina Dex sebesar Rp 3.337.739.027,16.

3.1.1.1.2. Retribusi Daerah **Rp 870.571.800,00** **Rp 1.020.834.115,00**

Retribusi Daerah BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 874.194.575,00 dan direalisasikan sebesar Rp 870.571.800,00 atau 99,59% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 150.262.315,00) atau (17,26%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 1.020.834.115,00. Penurunan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif retribusi karena permohonan keringanan dan adanya Barang Milik Daerah yang berubah fungsi pinjam pakai dengan instansi lain untuk menunjang tugas dan fungsi.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂක ව්‍යවස්ථාපන කමිටුව පාලකව කටයුතු කරනු ලබන ආයතනයකි

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Retribusi Daerah BPKA bersumber dari Retribusi Jasa Usaha, dimana seluruh pendapatannya berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
RETRIBUSI DAERAH				
RETRIBUSI JASA USAHA				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	439.369.475,00	457.246.500,00	104,07	571.148.740,00
Retribusi Penyewaan Tanah	134.200.000,00	134.450.000,00	100,19	126.200.000,00
Retribusi Pemakaian Ruang	300.625.100,00	278.875.300,00	92,77	323.485.375,00
JUMLAH (Rp)	874.194.575,00	870.571.800,00	99,59	1.020.834.115,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 870.571.800,00 merupakan retribusi yang berasal dari:

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 457.246.500,00 yang digunakan untuk rumah dinas dan penggunaan tanah dan bangunan lainnya
- Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp 134.450.000,00 yang digunakan untuk lahan parkir KPPD
- Retribusi Pemakaian Ruang sebesar Rp 278.875.300,00 yang digunakan untuk fotokopi sebesar Rp 83.488.800; kantin sebesar Rp 67.030.000,00; ATM sebesar Rp 37.855.200,00; Workshop TNKB sebesar Rp 64.301.300; Kantor Kas sebesar Rp 12.000.000,00; Aula sebesar Rp 8.000.000,00; dan Display Kendaraan sebesar Rp 6.200.000,00.

3.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp 108.239.513.315,87** **Rp 96.338.516.913,54**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 106.108.775.113,00 dan direalisasikan sebesar Rp 108.239.513.315,87 atau 102,01% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 11.900.996.402,33 atau 12,35% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 96.338.516.913,54. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan BPKA meliputi rincian sebagai berikut:

Tabel III.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	179.079.443,00	179.079.443,00	100,00	110.733.653,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	99.261.065.417,00	101.391.803.619,87	102,15	84.955.839.874,22



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	2022		%	2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.668.630.253,00	6.668.630.253,00	100,00	4.881.733.989,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	6.390.209.397,32
JUMLAH (Rp)	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	102,01	96.338.516.913,54

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 179.079.443,00 dan direalisasikan sebesar Rp 179.079.443,00 atau 100,00% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 68.345.790,00 atau 61,72% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 110.733.653,00. Bagian laba yang diterima tersebut bersumber dari pembagian dividen atas penyertaan modal BPKA pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.8
Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMN

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)	179.079.443,00	179.079.443,00	100,00	110.733.653,00
JUMLAH (Rp)	179.079.443,00	179.079.443,00	100,00	110.733.653,00

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 99.261.065.417,00 dan direalisasikan sebesar Rp 101.391.803.619,87 atau 102,15% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 16.435.963.745,65 atau 19,35% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 84.955.839.874,00. Bagian laba yang diterima tersebut bersumber dari pembagian dividen atas penyertaan modal BPKA pada PT. Bank BPD DIY serta Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.9
Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PT. Bank BPD DIY	95.761.065.417,29	95.761.065.417,29	100,00	84.955.839.874,00
Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	3.500.000.000,00	5.630.738.202,58	160,88	6.390.209.397,32
JUMLAH (Rp)	99.261.065.417,00	101.391.803.619,87	102,15	91.346.049.271,32



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකාරික පාලන කාර්යාලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 6.668.630.253,00 dan direalisasikan sebesar Rp 6.668.630.253,00 atau 100,00% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.786.896.264,00 atau 36,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 4.881.733.989,00. Bagian laba yang diterima tersebut bersumber dari pembagian dividen atas penyertaan modal BPKA pada PT. Taru Martani serta PT. Anindya Mitra Internasional (PT.AMI) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.10

Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PT. Taru Martani	5.439.572.184,00	5.439.572.184,00	100,00	3.837.562.289,00
PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	1.229.058.069,00	1.229.058.069,00	100,00	1.044.171.700,00
JUMLAH (Rp)	6.668.630.253,00	6.668.630.253,00	100,00	4.881.733.989,00

3.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp 105.497.499.242,47

Rp 34.185.798.108,70

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 81.926.521.502,00 dan direalisasikan sebesar Rp 105.497.499.242,47 atau 128,77% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 71.311.701.133,77 atau 208,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 34.185.798.108,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.11

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH				
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	940.481.499,00	1.853.603.625,00	197,09	1.204.811.786,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.892.295.000,00	13.182.014.000,00	269,44	4.829.780.000,00
Jasa Giro	9.467.350.348,00	10.360.056.324,00	109,43	20.126.803.195,96
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	335.793.183,00	7.750.000,00	2,31	590.688.235,01
Pendapatan Bunga	13.250.000.000,00	14.749.999.992,00	111,32	3.214.611.877,48
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.317.264,00	9.250.000,00	214,26	3.500.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	18.497.245,00	310.727.434,00	1.679,86	760.577.134,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	52.467.122.896,00	64.068.059.100,00	122,11	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	33.349.130,00	32.514.226,00	97,5	29.973.950,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	46.210.000,00	61.721.413,00	133,57	103.297.987,00
Pendapatan dari Pengembalian	471.104.937,00	861.803.128,47	182,93	3.321.753.943,25
TOTAL (Rp)	81.926.521.502,00	105.497.499.242,47	128,77	34.185.798.108,70



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආර්ථික විකේන්ද්‍රීකරණ කොමිෂන් සභාව
Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar sebesar Rp 940.481.499,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.853.603.625,00 atau 197,09% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 648.791.839,00 atau 53,85% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 1.204.811.786,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	541.666.000,00	1.150.079.126,00	212,32	136.200.000,00
-Hasil Penjualan Alat Angkutan	75.000.000,00	683.413.126,00	911,22	-
-Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	466.666.000,00	466.666.000,00	100,00	136.200.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	207.576.999,00	207.576.999,00	100,00	330.534.999,00
-Hasil Penjualan Bangunan Gedung	207.576.999,00	207.576.999,00	100,00	330.534.999,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	95.525.500,00	95.525.500,00	100,00	-
-Hasil Penjualan Hewan	95.525.500,00	95.525.500,00	100,00	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	95.713.000,00	400.422.000,00	418,36	738.076.787,00
-Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	95.713.000,00	400.422.000,00	418,36	738.076.787,00
TOTAL (Rp)	940.481.499,00	1.853.603.625,00	197,09	1.204.811.786,00

- Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp 466.666.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 466.666.000,00 dengan rincian:
 - Hasil penjualan BMD pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Balai Pendidikan sebesar Rp 466.666.000,00
- Hasil Penjualan Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp 207.576.999,00 dan direalisasikan sebesar Rp 207.576.999,00 dengan rincian:
 - Hasil penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada UPTD BPRSW Dinas Sosial DIY sebesar Rp 35.199.999,00
 - Hasil penjualan bangunan gedung di RS Ghrasia sebesar Rp 32.500.000,00
 - Hasil penjualan bekas bangunan gedung sebesar Rp 127.777.000,00
 - Hasil penjualan BMD berupa bangunan gedung di SMAN 1 Dlingo sebesar Rp 12.100.000,00
- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 95.525.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp 95.525.500,00 dengan rincian:
 - Hasil penjualan BMD berupa hewan ternak sapi sebesar Rp 82.775.500,00
 - Hasil penjualan BMD berupa hewan ternak domba sebesar Rp 12.750.000,00
- Hasil Penjualan Aset Lainnya—Aset Lain-Lain dianggarkan sebesar Rp 95.713.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 400.422.000,00 dengan rincian:
 - Hasil penjualan aset tetap lainnya oleh UD. Samak Jaya Karton sebesar Rp 70.713.000,00
 - Hasil penjualan bongkaran gedung sebesar Rp 329.709.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Sewa Barang Milik Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 4.892.295.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 13.182.014.000,00 atau 269,44% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 8.352.234.000,00 atau 172,93% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.829.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN				
Hasil Sewa BMD	4.059.295.000,00	12.349.014.000,00	304,22	3.996.380.000,00
Hasil dari Bangun Guna Serah	833.000.000,00	833.000.000,00	100,00	833.400.000,00
JUMLAH (Rp)	4.892.295.000,00	13.182.014.000,00	269,44	4.829.780.000,00

- Hasil Sewa BMD merupakan setoran pembayaran sewa tanah dan bangunan serta sewa lahan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp12.349.014.000,00.
- Hasil dari Bangun Guna Serah merupakan setoran pembayaran dari pengelolaan PT. YIS sebesar Rp 833.000.000,00.

• **Jasa Giro**

Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp 9.467.350.348,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.360.056.324,00 atau 109,43% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 9.766.746.871,96) atau (48,53%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 20.126.803.195,96. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
JASA GIRO				
Jasa Giro pada Kas Daerah	9.300.000.000,00	9.997.862.819,00	107,50	19.219.014.900,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	157.652.114,00	351.737.999,00	223,11	897.135.841,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	9.698.234,00	10.455.506,00	107,81	10.652.454,96
JUMLAH (Rp)	9.467.350.348,00	10.360.056.324,00	109,43	20.126.803.195,96

Jasa Giro pada Kas Daerah dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp 9.997.862.819,00 dan Rp 351.737.999,00 merupakan pelimpahan jasa giro SKPD dari PT Bank BPD DIY Cabang Utama ke kas daerah maupun kas di bendahara sepanjang Tahun Anggaran 2022. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp 10.455.506,00 merupakan setoran pengembalian jasa bank pada SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp 335.793.183,00 dan direalisasikan sebesar Rp 7.750.000,00 atau 2,31% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 582.938.235,01) atau (98,69%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 590.688.235,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR				
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	335.793.183,00	7.750.000,00	2,31	590.688.235,01
JUMLAH (Rp)	335.793.183,00	7.750.000,00	2,31	590.688.235,01

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan bunga Dana Bergulir sebesar Rp 7.750.000,00 yang berasal dari KSUSM Turi Sleman sebesar Rp 125.000,00; KSP Sido Subur sebesar Rp 6.000.000,00; KSU Syariah Mentari Turi Sleman sebesar Rp 125.000,00; dan BMT EL Bummi 372 sebesar Rp 1.500.000,00.

• **Pendapatan Bunga**

Pendapatan Bunga dianggarkan sebesar Rp 13.250.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 14.749.999.992,00 atau 111,32% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 11.535.388.114,52 atau 358,84% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 3.214.611.877,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN BUNGA				
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.250.000.000,00	14.749.999.992,00	111,32	3.214.611.877,48
JUMLAH (Rp)	13.250.000.000,00	14.749.999.992,00	111,32	3.214.611.877,48

Pendapatan Bunga BPKA Tahun Anggaran 2022 seluruhnya berasal dari penempatan rekening deposito pada Bank BPD DIY. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (halaman 206-208) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.

• **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dianggarkan sebesar Rp 4.317.264,00 dan direalisasikan sebesar Rp 9.250.000,00 atau 214,26% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.932.736,00 atau 140,94% dari penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 3.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.17

**Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan
 atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.317.264,00	9.250.000,00	214,26	3.500.000,00
JUMLAH (Rp)	4.317.264,00	9.250.000,00	214,26	3.500.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran ganti kerugian daerah dari PD Pertambangan sebesar Rp 1.250.000,00 serta bapak Ternalem DPRD DIY sebesar Rp 8.000.000,00.

- **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan sebesar Rp 18.497.245,00 dan direalisasikan sebesar Rp 310.727.434,00 sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 449.849.700,00) atau (59,15%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 760.577.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.18

**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda
 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

URAIAN	2021			2020
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	18.497.245,00	310.727.434,00	1.679,86	760.577.134,00
JUMLAH (Rp)	18.497.245,00	310.727.434,00	1.679,86	760.577.134,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan denda yang diakui oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari berbagai macam bidang, antara lain bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, bidang sosial, bidang keamanan dan ketertiban, bidang kebudayaan, bidang perekonomian, bidang kesehatan, serta bidang lingkungan hidup dengan total sebesar Rp 310.727.434,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකර්ෂණය කළු පාලකයාගේ කාර්යාලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp 52.467.122.896,00 dan direalisasikan sebesar Rp 64.068.059.100,00 atau 122,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH				
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.786.122.896,00	62.709.477.000,00	123,48	-
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.681.000.000,00	1.358.582.100,00	80,82	-
JUMLAH (Rp)	52.467.122.896,00	64.068.059.100,00	122,11	-

Tabel III.20
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.485.517.000,00	3.051.122.100,00	122,76	-
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	2.979.886.000,00	3.797.604.200,00	127,44	-
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	20.687.162.000,00	25.319.624.600,00	122,39	-
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	397.251.000,00	434.866.500,00	109,47	-
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	241.303.000,00	219.874.500,00	91,12	-
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	3.219.973.000,00	3.981.562.000,00	123,65	-
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.556.160.000,00	3.105.695.900,00	121,5	-
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	18.218.870.896,00	22.787.402.000,00	125,08	-
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	-	11.725.200,00	-	-
JUMLAH (Rp)	50.786.122.896,00	62.709.477.000,00	123,48	-

Tabel III.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	153.355.000,00	122.129.100,00	79,64	-
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	141.327.000,00	108.003.100,00	76,42	-
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	912.459.000,00	761.931.700,00	83,5	-
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	12.155.000,00	9.560.500,00	78,65	-
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	861.000,00	579.000,00	67,25	-
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	94.058.000,00	70.655.300,00	75,12	-
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	55.233.000,00	39.170.700,00	70,92	-
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	311.552.000,00	246.450.800,00	79,1	-
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	-	101.900,00	-	-
JUMLAH (Rp)	1.681.000.000,00	1.358.582.100,00	80,82	-



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.22
Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

UNIT KERJA	Denda PKB	Denda BBNKB	JUMLAH
KPPD Kota	12.560.973.100,00	185.447.000,00	12.746.420.100,00
KPPD Bantul	14.268.536.700,00	224.966.700,00	14.493.503.400,00
KPPD GK	5.853.372.800,00	177.148.700,00	6.030.521.500,00
KPPD KP	4.223.885.100,00	102.801.100,00	4.326.686.200,00
KPPD Sleman	25.802.709.300,00	668.218.600,00	26.470.927.900,00
JUMLAH (Rp)	62.709.477.000,00	1.358.582.100,00	64.068.059.100,00

- Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Pendapatan Denda Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp 33.349.130,00 dan direalisasikan sebesar Rp 32.514.226,00 atau 97,50% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.540.276,00 atau 8,47% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 29.973.950,00. Pendapatan Denda Retribusi Daerah bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha, dimana seluruh pendapatannya berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.23
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI DAERAH				
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha				
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.349.130,00	32.514.226,00	97,50	29.973.950,00
JUMLAH (Rp)	33.349.130,00	32.514.226,00	97,50	29.973.950,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp 32.349.130,00 berasal dari pendapatan denda sewa rumah dinas sebesar Rp 2.876.226,00 dan biaya penggantian STNK hilang sebesar Rp31.980.000,00.

- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dianggarkan sebesar Rp 46.210.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 61.721.413,00 atau 133,57% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 41.576.574,00) atau (40,25%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 103.297.987,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN				
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	46.210.000,00	61.721.413,00	133,57	103.297.987,00
JUMLAH (Rp)	46.210.000,00	61.721.413,00	133,57	103.297.987,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආයතන විපක්ෂකරණය කළ පාලක කමිටුවේ වාර්ෂික වාර්තාව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Pendapatan dari Pengembalian**

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp 471.104.937,00 dan direalisasikan sebesar Rp 861.803.128,47 atau 182,93% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 2.459.950.814,78) atau (74,06%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 3.321.753.943,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.25
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN				
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan	444.723.937,00	825.595.353,47	185,64	3.292.903.943,25
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Negeri—Perjalanan Dinas Biasa	26.381.000,00	36.207.775,00	137,25	28.850.000,00
JUMLAH (Rp)	471.104.937,00	861.803.128,47	182,93	3.321.753.943,25

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Negeri—Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 36.207.775,00 didapat dengan rincian:

- Setoran pengembalian atas LHP BPK pada belanja perjalanan dinas ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp 12.300.000,00
- Temuan BPK/BPKP atas kelebihan pembayaran penghasilan dan kegiatan pada Sekretariat Dewan DIY sebesar Rp 12.000.000,00
- Tindak lanjut temuan BPK pada Perjalan Dinas oleh PT. Dewata Sakti Tours and Travel TA 2019 pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp 5.000.000,00
- Setoran pengembalian atas tindak lanjut dari temuan BPK atas kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas ke Moscow pada Dinas Pariwisata sebesar Rp 6.907.775,00

3.1.1.2. Pendapatan Transfer Rp 3.257.721.489.974,00 Rp 3.794.855.660.531,00

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 3.286.900.087.342,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.257.721.489.974,00 atau 99,11% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 537.134.170.557,00) atau (14,15%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 3.794.855.660.531,00 dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 3.256.850.196.484,00 Rp 3.794.050.615.221,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 3.286.028.793.852,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.256.850.196.484,00 atau 99,11% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 537.200.418.737,00) atau (14,16%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 3.794.050.615.221,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.26
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	94.793.652.000,00	107.696.079.891,00	113,61	132.615.520.738,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.923.700.185,00	1.218.923.700.185,00	100,00	1.224.852.487.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	140.379.049.000,00	137.529.856.469,00	97,97	135.901.240.001,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	508.332.739.184,00	469.100.906.456,00	92,28	943.515.205.403,00
Jumlah (Rp)	1.962.429.140.369,00	1.933.250.543.001,00	98,51	2.436.884.453.142,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Insentif Daerah (DID)	64.312.676.000,00	64.312.676.000,00	100,00	77.593.507.000,00
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.259.286.977.483,00	1.259.286.977.483,00	100,00	1.279.572.655.079,00
Dana Penyesuaian				
Jumlah (Rp)	1.323.599.653.483,00	1.323.599.653.483,00	100,00	1.357.166.162.079,00
Jumlah (Rp) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	99,11	3.794.050.615.221,00

3.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 871.293.490,00 Rp 805.045.310,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 871.293.490,00 dan direalisasikan sebesar Rp 871.293.490,00 atau 100,00% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 66.248.180,00 atau 8,23% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 805.045.310,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.27
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	871.293.490,00	871.293.490,00	100,00	805.045.310,00
Jumlah (Rp)	871.293.490,00	871.293.490,00	100,00	805.045.310,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආයතනික වැයවිද්‍යාලයේ පාලන කොමිෂන් සභාව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 10.042.044.758,72 Rp 7.321.573.929,77

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 7.240.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 10.042.044.758,72 atau 138,69% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.720.470.828,95 atau 37,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 7.321.573.929,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.28
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN HIBAH	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	103,37	7.141.630.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	103,37	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	7.141.630.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	2.557.449.758,72	-	179.943.929,77
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan				
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	2.557.449.758,72	-	179.943.929,77
Jumlah (Rp)	7.240.500.000,00	10.042.044.758,72	138,69	7.321.573.929,77



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආකර්ෂණීය මූල්‍ය සේවා සංවිධානය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa **Rp 32.980.957.519,00** **Rp 28.828.044.525,20**

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 36.319.607.871,00 dan direalisasikan sebesar Rp 32.980.957.519,00 atau 90,81% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.152.912.993,80 atau 14,41% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 28.828.044.525,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.31
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BARANG DAN JASA				
Belanja Barang				
Belanja Barang Pakai Habis	8.631.247.589,00	7.635.244.608,00	88,46	7.114.492.359,00
Jumlah (Rp)	8.631.247.589,00	7.635.244.608,00	88,46	7.114.492.359,00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Kantor	17.881.551.346,00	16.058.000.816,00	89,80	14.419.832.528,20
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.300.000.000,00	1.241.624.621,00	95,51	1.186.656.315,00
Belanja Sewa Tanah	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	11.600.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	366.445.000,00	361.419.000,00	98,63	432.850.480,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	256.500.000,00	249.990.000,00	97,46	446.160.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	121.080.000,00	120.924.000,00	99,87	123.804.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	135.000.000,00	109.016.940,00	80,75	21.941.160,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.942.852.936,00	1.779.446.130,00	91,59	546.679.500,00
Jumlah (Rp)	22.015.029.282,00	19.932.021.507,00	90,54	17.189.523.983,20
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan Tanah	250.000.000,00	248.968.000,00	99,59	159.989.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.228.650.000,00	2.130.804.940,00	95,61	2.086.045.696,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.610.405.000,00	1.549.041.609,00	96,19	1.203.266.684,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	29.912.500,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	30.000.000,00
Jumlah (Rp)	4.134.055.000,00	3.973.814.549,00	96,12	3.509.213.880,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	1.539.276.000,00	1.439.876.855,00	93,54	1.014.814.303,00
Jumlah (Rp)	1.539.276.000,00	1.439.876.855,00	93,54	1.014.814.303,00
Jumlah (Rp) Belanja Barang dan Jasa	36.319.607.871,00	32.980.957.519,00	90,81	28.828.044.525,20



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආයතන විපක්ෂකරණයක්ව පාලනය කෙරෙන ආයතනික ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Belanja Barang Pakai Habis**

Belanja Barang Pakai Habis BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 8.631.247.589,00 dan direalisasikan sebesar Rp 7.635.244.608,00 atau 88,46% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.32
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA BARANG				
Belanja Barang Pakai Habis				
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.816.000,00	1.779.089,00	(36.911,00)	97,97
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	514.595.989,00	504.577.357,00	(10.018.632,00)	98,05
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	500.000,00	-	100,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	40.639.000,00	40.622.500,00	(16.500,00)	99,96
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.974.000,00	25.451.725,00	(522.275,00)	97,99
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	194.554.000,00	133.319.968,00	(61.234.032,00)	68,53
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.213.200,00	1.600.000,00	(2.613.200,00)	37,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.018.000,00	187.564.130,00	(30.453.870,00)	86,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	826.332.000,00	766.560.144,00	(59.771.856,00)	92,77
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.579.645.200,00	3.193.303.294,00	(386.341.906,00)	89,21
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	36.627.000,00	22.760.000,00	(13.867.000,00)	62,14
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	981.206.000,00	899.852.168,00	(81.353.832,00)	91,71
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	47.571.000,00	46.459.790,00	(1.111.210,00)	97,66
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	164.497.000,00	144.065.500,00	(20.431.500,00)	87,58
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	125.037.000,00	124.390.000,00	(647.000,00)	99,48
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	253.808.000,00	215.906.569,00	(37.901.431,00)	85,07
Belanja Obat-Obatan-Obat	12.690.000,00	11.639.000,00	(1.051.000,00)	91,72
Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.527.200,00	8.527.000,00	(200,00)	100,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	10.404.000,00	10.400.000,00	(4.000,00)	99,96
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.782.000,00	3.782.000,00	-	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.461.153.000,00	1.184.451.374,00	(276.701.626,00)	81,06
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	19.488.000,00	19.488.000,00	-	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	96.570.000,00	84.645.000,00	(11.925.000,00)	87,65
Jumlah (Rp)	8.631.247.589,00	7.635.244.608,00	(996.002.981,00)	88,46

Belanja Barang Pakai Habis yang merupakan pembentuk barang Persediaan adalah sebesar Rp 6.346.660.234,00. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 1.184.451.374,00; Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp 19.488.000,00; dan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp 84.645.000,00 merupakan belanja barang pakai habis yang tidak membentuk barang Persediaan.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආර්ථික විනිසුරු සේවා කොමිෂන් සභාව
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Belanja Jasa Kantor**

Belanja Jasa Kantor BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 17.881.551.346,00 dan direalisasikan sebesar Rp 16.058.000.816,00 atau 89,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.33
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Jasa Kantor				
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	460.160.000,00	368.710.000,00	(91.450.000,00)	80,13
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	950.300.000,00	730.710.000,00	(219.590.000,00)	76,89
Honorarium Tim Penyelenggara Ujian	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	3.217.200.000,00	3.041.635.000,00	(175.565.000,00)	94,54
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	737.100.000,00	734.902.000,00	(2.198.000,00)	99,70
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	302.280.000,00	277.980.000,00	(24.300.000,00)	91,96
Belanja Jasa Tenaga Ahli	700.000.000,00	598.845.000,00	(101.155.000,00)	85,55
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.876.639.600,00	1.862.035.528,00	(14.604.072,00)	99,22
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.770.079.200,00	2.670.351.564,00	(99.727.636,00)	96,40
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	34.064.000,00	30.464.000,00	(3.600.000,00)	89,43
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	9.980.000,00	(20.000,00)	99,80
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	465.000.000,00	437.973.300,00	(27.026.700,00)	94,19
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	20.280.000,00	16.747.750,00	(3.532.250,00)	82,58
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	82.355.000,00	81.532.000,00	(823.000,00)	99,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000,00	23.947.480,00	(26.052.520,00)	47,89
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	937.800.000,00	840.320.000,00	(97.480.000,00)	89,61
Belanja Tagihan Telepon	35.979.200,00	18.685.657,00	(17.293.543,00)	51,93
Belanja Tagihan Air	101.089.500,00	45.070.206,00	(56.019.294,00)	44,58
Belanja Tagihan Listrik	2.495.238.146,00	1.918.661.261,00	(576.576.885,00)	76,89
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	48.792.000,00	46.168.000,00	(2.624.000,00)	94,62
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.260.684.600,00	1.144.508.789,00	(116.175.811,00)	90,78
Belanja Paket/Pengiriman	729.290.000,00	729.161.500,00	(128.500,00)	99,98
Belanja Registrasi/Keanggotaan	145.000.000,00	123.120.000,00	(21.880.000,00)	84,91
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	383.220.100,00	299.491.781,00	(83.728.319,00)	78,15
Belanja Pengolahan Air Limbah	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
Belanja Lembur	-	-	-	-
Jumlah (Rp)	17.881.551.346,00	16.058.000.816,00	(1.823.550.530,00)	89,80



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Belanja luran Jaminan/Asuransi**

Belanja luran Jaminan/Asuransi BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.241.624.621,00 atau 95,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.34

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja luran Jaminan/Asuransi

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja luran Jaminan/Asuransi				
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.300.000.000,00	1.241.624.621,00	(58.375.379,00)	95,51
Jumlah (Rp)	1.300.000.000,00	1.241.624.621,00	(58.375.379,00)	95,51

• **Belanja Sewa Tanah**

Belanja Sewa Tanah BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 11.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 11.600.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.35

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Sewa Tanah				
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00
Jumlah (Rp)	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00

• **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 366.445.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 361.419.000,00 atau 98,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.36

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.000.000,00	41.300.000,00	(700.000,00)	98,33
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	18.770.000,00	16.317.000,00	(2.453.000,00)	86,93
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	305.375.000,00	303.802.000,00	(1.573.000,00)	99,48
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	300.000,00	-	(300.000,00)	-
Jumlah (Rp)	366.445.000,00	361.419.000,00	(5.026.000,00)	98,63



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආරක්ෂක ව්‍යවස්ථාපන කමිටුවේ වාර්ෂික වාර්තාවක්

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 256.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 249.990.000,00 atau 97,46% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.37
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	240.000.000,00	239.000.000,00	(1.000.000,00)	99,58
Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	7.500.000,00	1.990.000,00	(5.510.000,00)	26,53
Jumlah (Rp)	256.500.000,00	249.990.000,00	(6.510.000,00)	97,46

- **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 121.080.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 120.924.000,00 atau 99,87% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.38
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				
Belanja Sewa Tanaman	121.080.000,00	120.924.000,00	(156.000,00)	99,87
Jumlah (Rp)	121.080.000,00	120.924.000,00	(156.000,00)	99,87

- **Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi**

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 135.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 109.016.940,00 atau 80,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.39
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi				
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	35.000.000,00	13.279.440,00	(21.720.560,00)	37,94
Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000,00	95.737.500,00	(4.262.500,00)	95,74
Jumlah (Rp)	135.000.000,00	109.016.940,00	(25.983.060,00)	80,75



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකෘතිමය වාර්තා සහ වාර්තා කළමනාකරණ කොමිෂන් සභාව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.942.852.936,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.779.446.130,00 atau 91,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.40
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	421.516.000,00	416.511.080,00	(5.004.920,00)	98,81
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.150.400.000,00	1.037.269.050,00	(113.130.950,00)	90,17
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	90.000.000,00	89.466.000,00	(534.000,00)	99,41
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	280.936.936,00	236.200.000,00	(44.736.936,00)	84,08
Jumlah (Rp)	1.942.852.936,00	1.779.446.130,00	(163.406.806,00)	91,59

• **Belanja Pemeliharaan Tanah**

Belanja Pemeliharaan Tanah BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 248.968.000,00 atau 99,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.41
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Pemeliharaan Tanah				
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	250.000.000,00	248.968.000,00	(1.032.000,00)	99,59
Jumlah (Rp)	250.000.000,00	248.968.000,00	(1.032.000,00)	99,59



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමය මහජන මුදල් කළමනාකරණ සේවය
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 2.228.650.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.130.804.940,00 atau 95,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.42
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
Belanja Pemeliharaan Alat Besar	339.685.000,00	335.708.820,00	(3.976.180,00)	98,83
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan	118.220.000,00	93.606.270,00	(24.613.730,00)	79,18
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	413.625.000,00	375.802.250,00	(37.822.750,00)	90,86
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.200.000,00	30.200.000,00	-	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	1.326.920.000,00	1.295.487.600,00	(31.432.400,00)	97,63
Jumlah (Rp)	2.228.650.000,00	2.130.804.940,00	(97.845.060,00)	95,61

- Realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Besar terdiri dari Belanja Alat Besar Darat berupa Alat Pengangkat sebesar Rp 121.638.500,00 serta Belanja Alat Bantu berupa Electric Generating Set sebesar Rp 167.375.320,00; Pompa sebesar Rp 2.695.000,00; Alat Bantu Lainnya sebesar Rp 44.000.000,00
- Realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan terdiri dari Belanja Alat Angkutan Darat Bermotor berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp 45.904.270,00; Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 43.540.000,00; dan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp 4.162.000,00
- Realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari Belanja Alat Kantor berupa Mesin Ketik sebesar Rp 500.000,00; Alat Kantor Lainnya sebesar Rp 74.857.000,00; serta Belanja Alat Rumah Tangga berupa Mebel sebesar Rp 6.440.000,00; Alat Pendingin sebesar Rp 231.149.000,00; Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp 8.500.000,00; dan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp 54.356.250,00
- Realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terdiri dari Belanja Alat Studio berupa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 200.000,00; Belanja Alat Komunikasi berupa Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp 20.000.000,00; dan Belanja Alat Pemancar berupa Peralatan Perlengkapan Radio sebesar Rp 10.000.000,00
- Realisasi Belanja Pemeliharaan Komputer terdiri dari Belanja Komputer Unit berupa Komputer Jaringan sebesar Rp 859.835.000,00; Personal Computer sebesar Rp 246.760.000,00; Komputer Unit Lainnya sebesar Rp 108.900.000,00 serta Belanja Peralatan Komputer berupa Peralatan Personal Computer sebesar Rp 63.071.600,00; Peralatan Jaringan sebesar Rp 5.921.000,00; Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp 11.000.000,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමය පාලන කොමිෂන් සභාව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.610.405.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.549.041.609,00 atau 96,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.43
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung Kantor	528.263.000,00	524.700.567,00	(3.562.433,00)	99,33
Bangunan Gudang	120.017.000,00	119.390.445,00	(626.555,00)	99,48
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	0	-	-
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	947.125.000,00	889.950.597,00	(57.174.403,00)	93,96
Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Rumah Tidak Bersusun	-	0	-	-
Jumlah (Rp)	1.610.405.000,00	1.549.041.609,00	(61.363.391,00)	96,19

- **Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 45.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.44
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
Jumlah (Rp)	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00

- **Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri**

Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.539.276.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.439.876.855,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආකෘතිමය පාලන කොමිෂන් සභාව
 財政管理委員会

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.45
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA JASA				
Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri				
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	483.950.000,00	465.324.415,00	(18.625.585,00)	96,15
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	675.040.000,00	654.065.000,00	(20.975.000,00)	96,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	0	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	380.286.000,00	320.487.440,00	(59.798.560,00)	84,28
Jumlah (Rp)	1.539.276.000,00	1.439.876.855,00	(99.399.145,00)	93,54

3.1.2.2 Belanja Modal

Rp 4.353.669.090,00

Rp 2.549.120.030,00

Belanja Modal BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 4.617.323.710,00 dan direalisasikan sebesar Rp 4.353.669.090,00 atau 94,29% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.804.549.060,00 atau 70,79% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 2.549.120.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.46
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.330.363.710,00	4.068.274.410,00	93,95	1.522.408.530,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.960.000,00	285.394.680,00	99,45	140.984.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	885.727.500,00
Jumlah (Rp)	4.617.323.710,00	4.353.669.090,00	94,29	2.549.120.030,00

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**



CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN
3.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 4.068.274.410,00 Rp 1.522.408.530,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 4.330.363.710,00 dan direalisasikan sebesar Rp 4.068.274.410,00 atau 93,95% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.545.865.880,00 atau 167,23% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 1.522.408.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.47
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
Belanja Modal Alat Bantu	131.808.000,00	129.895.000,00	(1.913.000,00)	98,55
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	866.290.000,00	850.500.000,00	(15.790.000,00)	98,18
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.437.000,00	2.291.925,00	(145.075,00)	94,05
Belanja Modal Alat ukur	3.042.000,00	2.999.997,00	(42.003,00)	98,62
Belanja Modal Alat Kantor	1.327.497.450,00	1.170.615.001,00	(156.882.449,00)	88,18
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	251.555.800,00	216.981.490,00	(34.574.310,00)	86,26
Belanja Modal Alat Studio	63.477.500,00	56.265.000,00	(7.212.500,00)	88,64
Belanja Modal Alat Kedokteran	5.848.000,00	5.840.000,00	(8.000,00)	99,86
Belanja Modal Komputer Unit	809.476.800,00	791.818.499,00	(17.658.301,00)	97,82
Belanja Modal Peralatan Komputer	818.931.160,00	791.125.498,00	(27.805.662,00)	96,60
Belanja Modal Sumur	50.000.000,00	49.942.000,00	(58.000,00)	99,88
JUMLAH (Rp)	4.330.363.710,00	4.068.274.410,00	(262.089.300,00)	93,95

3.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 285.394.680,00 Rp 140.984.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 286.960.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 285.394.680,00 atau 99,45% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 144.410.680,00 atau 102,43% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 140.984.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.48
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN				
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	286.960.000,00	285.394.680,00	(1.565.320,00)	99,45
Jumlah (Rp)	286.960.000,00	285.394.680,00	(1.565.320,00)	99,45

3.1.2.3. Belanja Tidak Terduga Rp 5.735.041.553,00 Rp 53.316.587.701

Belanja Tidak Terduga BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 62.545.932.869,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.735.041.553,00 atau 9,17% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 47.581.546.148,00) atau (89,24%) dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 53.316.587.701,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.49

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,17	53.316.587.701,00
Jumlah (Rp)	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	9,17	53.316.587.701,00

3.1.2.4. Belanja Transfer

Rp 1.293.331.949.761,51

Rp 1.246.759.114.291,51

Belanja Transfer BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.315.904.576.141,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.293.331.949.761,51 atau 98,28% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 46.572.835.470,00 atau 3,74% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 1.246.759.114.291,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.49

Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	839.016.298.042,00	839.016.298.042,00	100,00	713.118.316.167,00
Belanja Bantuan Keuangan	476.888.278.099,00	454.315.651.719,51	95,27	533.640.798.124,51
Jumlah (Rp)	1.315.904.576.141,00	1.293.331.949.761,51	98,32	1.246.759.114.291,51

- Belanja Bagi Hasil**

Belanja Bagi Hasil BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 839.016.298.042,00 dan direalisasikan sebesar Rp 839.016.298.042,00 atau 100,00% sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 125.897.981.875,00 atau 17,65% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 713.118.316.167,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.50

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BAGI HASIL				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten	693.691.955.436,00	693.691.955.436,00	100,00	589.555.394.937,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota	145.324.342.606,00	145.324.342.606,00	100,00	123.562.921.230,00
Jumlah (Rp)	839.016.298.042,00	839.016.298.042,00	100,00	713.118.316.167,00

- Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan Keuangan BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 476.888.278.099,00 dan direalisasikan sebesar Rp 454.315.651.719,51 atau 95,27% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 79.325.146.405,00) atau (14,86%) dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආයතනික පාලන මණ්ඩලයක් වශයෙන් කළ කටයුතු
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.51

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	369.669.592.099,00	352.767.994.612,32	95,43	484.644.483.000,29
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.218.686.000,00	100.547.657.107,19	94,66	48.996.315.124,22
Jumlah (Rp)	476.888.278.099,00	454.315.651.719,51	95,27	533.640.798.124,51

3.1.2.5. Surplus/Defisit

Rp 4.019.551.433.965,40

Rp 4.161.668.711.408,30

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 3.907.112.968.814,00 dan direalisasikan sebesar Rp 4.019.551.433.965,40 atau 102,88%. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi Pendapatan Daerah dengan total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Surplus Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp 142.117.277.442,90) atau (3,41%) dibandingkan dengan Surplus Tahun 2021 sebesar Rp 4.161.668.711.408,30. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.52

Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
SURPLUS/DEFISIT				
Pendapatan Daerah	5.407.663.603.049,00	5.433.638.565.323,91	100,48	5.622.160.418.029,01
Belanja Daerah	1.500.550.634.235,00	1.414.087.131.358,51	94,27	1.460.497.516.112,71
Jumlah (Rp)	3.907.112.968.814,00	4.019.551.433.965,40	102,88	4.161.668.711.408,30



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ບ້ານພັດທະນາທຶນສາທາລະນະສະຖານະລັດຖະບານ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2022	2021 (audited)
3.1.3. <u>Pembiayaan Daerah</u>	Rp 381.012.337.214,50	Rp 381.560.546.739,46

Pembiayaan Netto BPKA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 390.811.837.414,00 dan direalisasikan sebesar Rp 381.012.337.214,50 atau 97,49% sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp 548.209.524,96) atau (0,14%) dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 381.560.546.739,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.53
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

URAIAN	2022			2021
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	554.487.394.414,00	554.487.394.414,50	100,00	484.453.213.139,46
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	199.942.800,00	2,00	9.607.333.600,00
Jumlah (Rp)	564.487.394.414,00	554.687.337.214,00	98,26	494.060.546.739,46
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan Modal Daerah	173.675.557.000,00	173.675.000.000,00	100,00	112.500.000.000,00
Jumlah (Rp)	173.675.557.000,00	173.675.000.000,00	100,00	112.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	390.811.837.414,00	381.012.337.214,50	97,49	381.560.546.739,46

• **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 554.687.337.214,50 merupakan penerimaan pembiayaan yang didapat dari SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 554.487.394.414,50 dengan rincian:

- Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp 33.258.981.661,50
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar (Rp 10.884.676.712,00)
- Pelampauan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp 254.926.070,00)
- Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 4.607.333.600,00
- Penghematan Belanja sebesar Rp 482.057.044.550,00
- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000,00
- Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp 40.703.637.385,00

Ditambah dengan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 199.942.800,00 dengan rincian:

- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp 199.942.800,00

• **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 173.675.000.000,00 merupakan pengeluaran pembiayaan yang didapat dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Bank BPD DIY sebesar Rp 173.675.000.000,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආකර්ෂිතවලාභකර්මාන්විභාගය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2022	2021 (audited)
3.1.4. Aset	<u>Rp 3.402.608.747.152,62</u>	<u>Rp 3.183.073.464.246,90</u>

Aset BPKA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.402.608.747.152,62 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 415.431.968.496,00; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 1.955.017.607.030,46; Aset Tetap sebesar Rp 862.374.245.423,62; dan Aset Lainnya sebesar Rp 169.784.926.202,54.

3.1.4.1. Aset Lancar	<u>Rp 415.431.968.496,00</u>	<u>Rp 517.807.489.983,72</u>
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Aset Lancar BPKA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 415.431.968.496,00 terdiri dari Kas dan Setara Kas sebesar Rp 411.828.641.051,77; Piutang Pajak Daerah sebesar Rp 122.616.000,00; Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 2.616.065.508,97; Penyisihan Piutang sebesar (Rp 2.706.824.063,55); Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 706.718.283,40 dan Persediaan sebesar Rp 2.864.751.715,41.

3.1.4.1.1. Kas dan Setara Kas	<u>Rp 411.828.641.051,77</u>	<u>Rp 513.471.984.112,22</u>
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp 411.828.641.051,77 merupakan Kas di Kas Daerah dengan perhitungan sebagai berikut:

- Saldo awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp 513.471.984.112,22
- Ditambah Setoran Pendapatan sebesar Rp 5.433.638.565.323,91
- Ditambah STS Pengembalian Belanja sebesar Rp 26.357.048.719,49
- Ditambah pemindahan beban Belanja Tidak Terduga ke BPBD sebesar Rp 5.726.667.022,00
- Ditambah Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 199.942.800,00
- Dikurangi SP2D Belanja sebesar Rp 1.440.444.180.078,00
- Dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 173.675.000.000,00
- Dikurangi Pemindahan RK SKPD dan Kas di Kas Daerah dari OPD lain sebesar Rp 3.953.446.386.847,85

3.1.4.1.2. Piutang Pajak Daerah	<u>Rp 122.616.000,00</u>	<u>Rp 129.631.200,00</u>
--	---------------------------------	---------------------------------

Saldo Piutang Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 122.616.000,00 terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 87.643.000,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 34.973.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 54
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No.	PIUTANG PAJAK DAERAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2021			31-12-2022
	PIUTANG PKB	89.978.200,00	-	2.335.200,00	87.643.000,00
1	KPPD Kota	30.936.500,00	-	1.504.200,00	29.432.300,00
2	KPPD Bantul	19.887.300,00	-	691.500,00	19.195.800,00
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	5.559.000,00	-	-	5.559.000,00
5	KPPD Sleman	33.595.400,00	-	139.500,00	33.455.900,00
	PIUTANG BBNKB	39.653.000,00	-	4.680.000,00	34.973.000,00
1	KPPD Kota	2.055.000,00	-	-	2.055.000,00
2	KPPD Bantul	3.507.000,00	-	-	3.507.000,00
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	-	-	-	-
5	KPPD Sleman	34.091.000,00	-	4.680.000,00	29.411.000,00
	JUMLAH (Rp)	129.631.200,00	-	7.015.200,00	122.616.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.55
Kategori Umur Piutang Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	2022	2021
<1 Tahun	Lancar	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	-	5.044.500,00
2-5 Tahun	Diragukan	7.248.000,00	8.300.700,00
>5 Tahun	Macet	115.368.000,00	116.286.000,00
JUMLAH (Rp)		122.616.000,00	129.631.200,00

Tabel III.56
Kategori Umur Piutang Pajak Daerah per Unit Kerja

UNIT KERJA	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH (Rp)
	<1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	>5 Tahun	
KPPD Kota	-	-	387.000,00	31.100.300,00	31.487.300,00
KPPD Bantul	-	-	1.852.500,00	20.850.300,00	22.702.800,00
KPPD Gunungkidul	-	-	-	-	-
KPPD Kulon Progo	-	-	-	5.559.000,00	5.559.000,00
KPPD Sleman	-	-	5.008.500,00	57.858.400,00	62.866.900,00
Jumlah (Rp)	-	-	7.248.000,00	115.368.000,00	122.616.000,00

3.1.4.1.3. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Rp 2.616.065.508,97

Rp 2.750.497.613,55

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.616.065.508,97 terdiri dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 2.050.000,00; Piutang Jasa Giro sebesar Rp 2.843.595,42; Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp 30.478.150,00; Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 212.248.281,55; dan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp 2.368.445.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 57
Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2021			31-12-2022
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
2	Piutang Jasa Giro	-	2.843.595,42	-	2.843.595,42
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	33.793.850,00	421.000,00	3.315.700,00	30.899.150,00
4	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	213.498.281,55	-	1.250.000,00	212.248.281,55
5	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.501.155.482,00	-	132.710.000,00	2.368.445.482,00
JUMLAH (Rp)		2.750.497.613,55	421.000,00	137.275.700,00	2.613.642.913,55



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.050.000,00 merupakan Piutang Hasil Sewa BMD berupa tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014. Terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2012 tanah tersebut telah diserahkan kembali kepada Pemda DIY karena penyewa sudah tidak sanggup untuk membayar sewa. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 2.050.000,00 tersebut dalam kategori macet.

• **Piutang Jasa Giro**

Piutang Jasa Giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.843.595,42 merupakan Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility. Piutang ini diakui karena terdapat remunerasi dari Kementerian Keuangan yang telah ditransfer namun belum ditarik ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

• **Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 30.478.150,00 bersumber dari Piutang Pendapatan Denda PKB sebesar Rp 28.578.650,00 dan Piutang Pendapatan Denda BBNKB sebesar Rp 1.899.500,00 yang telah ditetapkan namun belum dibayar oleh Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.58

Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

No.	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2021			31-12-2022
	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PKB	28.977.150,00	-	398.500,00	28.578.650,00
1	KPPD Kota	9.757.950,00	-	40.500,00	9.717.450,00
2	KPPD Bantul	11.468.700,00	-	358.000,00	11.110.700,00
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	148.400,00	-	-	148.400,00
5	KPPD Sleman	7.602.100,00	-	-	7.602.100,00
	PIUTANG PENDAPATAN DENDA BBNKB	4.816.700,00	-	2.917.200,00	1.899.500,00
1	KPPD Kota	-	-	-	-
2	KPPD Bantul	628.300,00	-	-	628.000,00
3	KPPD GK	-	-	-	-
4	KPPD KP	-	-	-	-
5	KPPD Sleman	4.188.400,00	-	2.917.200,00	1.271.200,00
	JUMLAH (Rp)	33.793.850,00	-	3.315.700,00	30.478.150,00

Tabel III.59

Kategori Umur Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	2022	2021
Belum jatuh tempo	Lancar	-	157.500,00
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	-	1.853.000,00
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	2.967.200,00	1.296.300,00
1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara	Macet	27.510.950,00	30.487.050,00
JUMLAH (Rp)		30.478.150,00	33.793.850,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.60

Kualitas Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

UNIT KERJA	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH (Rp)
	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
KPPD Kota	-	-	157.500,00	9.559.950,00	9.717.450,00
KPPD Bantul	-	-	966.600,00	10.772.400,00	11.739.000,00
KPPD Gunungkidul	-	-	-	-	-
KPPD Kulon Progo	-	-	-	148.400,00	148.400,00
KPPD Sleman	-	-	1.843.100,00	7.030.200,00	8.873.300,00
JUMLAH (Rp)	-	-	2.967.200,00	27.510.950,00	30.478.150,00

- **Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp 212.248.281,55 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel III.61

Rincian Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No.	PIUTANG PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
		31-12-2021			31-12-2022
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	213.498.281,55	-	1.250.000,00	212.248.281,55
	JUMLAH (Rp)	213.498.281,55	-	1.250.000,00	212.248.281,55

Terdapat piutang atas tindak lanjut temuan anggota DPRD tahun 2004 yang tidak menandatangani SKTJM dengan rincian:

- Pada 31 Desember 2012 sebanyak 17 orang sebesar Rp 274.284.530,00 yang telah diangsur Rp 5.500.000,00 dan sisa sebesar Rp 268.784.530,00
- Pada tahun 2013, 4 orang diantaranya telah menandatangani SKTJM, sehingga sampai dengan 31 Desember 2013 saldo Tindak Lanjut Temuan anggota DPRD 2004 yang tidak menandatangani SKTJM adalah 13 orang dan belum dapat diakui sebagai piutang
- Sampai dengan 31 Desember 2022, Saldo Tindak Lanjut Temuan DPRD 2004 yang tidak menandatangani SKTJM adalah 13 orang sebesar Rp 192.737.115,00 dan belum dapat diakui sebagai piutang.

- **Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.368.445.482,00 terdiri atas Piutang Bunga Dana Bergulir sebesar Rp 2.225.531.482,00 dan Piutang Denda Dana Bergulir sebesar Rp 142.914.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 74.175.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 135.390.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦠꦺꦒꦺꦴꦲꦠꦺꦁꦤ꧀ꦢꦲꦫ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Piutang Bunga Dana Bergulir di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp 64.275.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp 103.890.000,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp 64.275.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp 103.890.000,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp 2.140.856.482,00
- Piutang Bunga Dana Bergulir di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 10.500.000,00 serta Piutang Denda Dana Bergulir di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 7.524.000,00

3.1.4.1.5. Penyisihan Piutang

(Rp 2.706.824.063,55)

(Rp 1.960.981.651,05)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, aset berupa piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), sehingga nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Perhitungan penyisihan piutang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar : Belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (Penyisihan 0,5%)
2. Kualitas Kurang Lancar : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Tagihan Pertama (Penyisihan 10%)
3. Kualitas Diragukan : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Tagihan Kedua (Penyisihan 50%)
4. Kualitas Macet : Belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara (Penyisihan 100%)

Penyisihan Piutang BPKA per 31 Desember 2022 sebesar (Rp 2.706.824.063,55) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar (Rp 118.992.000,00) dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp 2.587.832.063,55) dengan rincian sebagai berikut:

- **Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah BPKA per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp 118.995.960,00) dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.62

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	PRESENTASE PENYISIHAN	PIUTANG PAJAK DAERAH	PENYISIHAN PIUTANG
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	7.248.000,00	3.624.000,00
>5 Tahun	Macet	100%	115.368.000,00	115.368.000,00
JUMLAH (Rp)			122.616.000,00	118.992.000,00

Tabel III.63

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per Unit Kerja

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	%	KPPD KOTA	KPPD BANTUL	KPPD GK	KPPD KP	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-	-	-	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-	-	-	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	193.500,00	926.250,00	-	-	2.504.250,00	3.624.000,00
>5 Tahun	Macet	100%	31.100.300,00	20.850.300,00	-	5.559.000,00	57.858.400,00	115.368.000,00
JUMLAH (Rp)			31.293.800,00	21.776.550,00	-	5.559.000,00	60.362.650,00	118.992.000,00

• **Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah BPKA per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp 258.783.2063,55) terdiri dari Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar (Rp 2.050.000,00), Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar (Rp 28.994.550,00), Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar (Rp 212.248.281,55), dan Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar (Rp 2.344.539.232,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.64

Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pos Neraca	Saldo Akhir	Jatuh Tempo	Usia Piutang	Penyisihan Piutang	
	31-12-2022				
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan					
Penyewaan Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman	2.050.000,00	31-12-2014	Macet	100%	2.050.000,00
Jumlah (Rp)	2.050.000,00				2.050.000,00

Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penyisihan piutang dari Penyewaan Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman sebesar Rp 2.050.000,00 yang jatuh tempo sejak 31 Desember 2014.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.65

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	PRESENTASE PENYISIHAN	PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	PENYISIHAN PIUTANG
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	2.967.200,00	1.483.600,00
>5 Tahun	Macet	100%	27.510.950,00	27.510.950,00
JUMLAH (Rp)			30.478.150,00	28.994.550,00

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp 28.994.550,00 merupakan penyisihan piutang dari denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar (Rp 27.095.050,00) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar (Rp 1.899.500,00).

Tabel III.66

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per Unit Kerja

UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	%	KPPD KOTA	KPPD BANTUL	KPPD GK	KPPD KP	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
<1 Tahun	Lancar	0,5%	-	-	-	-	-	-
1-2 Tahun	Kurang Lancar	10%	-	-	-	-	-	-
2-5 Tahun	Diragukan	50%	78.750,00	483.300,00	-	-	921.550,00	1.483.600,00
>5 Tahun	Macet	100%	9.559.950,00	10.772.400,00	-	148.400,00	7.030.200,00	27.510.950,00
JUMLAH (Rp)			9.638.700,00	11.255.700,00	-	148.400,00	7.951.750,00	28.994.550,00

Tabel III.67

Rincian Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pos Neraca	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Jatuh Tempo	Usia Piutang	Penyisihan Piutang	
	01-01-2022	Bertambah	Berkurang	31-12-2022				
Piutang TGR								
Sudjono (Biro Perekonomian)	23.618.136,55	-	1.250.000,00	22.368.136,55	s.d. Juli 2014 macet, mulai Agustus 2014 melakukan pembayaran	Macet	100%	22.368.136,55
40 Anggota DPRD DIY Periode 1999-2004 dan 2004-2009	189.880.145,00	-	-	189.880.145,00	Jatuh tempo 1 Sep 2011 untuk yang ber-SKTJM 1 Sep 2009 dan 1 April untuk yang ber-SKTJM 1 April 2010	Macet	100%	189.880.145,00
Jumlah (Rp)	213.498.281,55	-	1.250,00,00	212.248.281,55				212.248.281,55

Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan penyisihan piutang dari Sudjono, Biro Perekonomian sebesar (Rp 22.368.136,55) dan 40 (empat puluh) Anggota DPRD DIY Periode 1999-2004 dan 2004-2009 sebesar (Rp 189.880.145,00). Selama Tahun Anggaran 2022, piutang yang berhasil tertagih adalah sebesar Rp 1.250.000,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.68

Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

PIUTANG	PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG
Piutang Bunga Dana Bergulir	2.225.531.482,00	2.201.625.232,00
Piutang Denda Dana Bergulir	142.914.000,00	142.914.000,00
JUMLAH (Rp)	2.368.445.482,00	2.344.539.232,00

Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir sebesar Rp 2.201.625.232,00 merupakan penyisihan atas piutang bunga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 74.175.000,00; Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp 2.116.950.232,00; serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.500.000,00. Penyisihan Piutang Denda Dana Bergulir sebesar Rp 142.914.000,00 merupakan penyisihan atas piutang denda dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 135.390.000,00 serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 7.524.000,00

3.1.4.1.6. Beban Dibayar Dimuka Rp 706.718.283,40 Rp 672.352.262,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 706.718.283,40 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka berupa Premi Asuransi oleh BPKA (induk) sebesar Rp 687.145.681,00; Beban Sewa Dibayar Dimuka berupa Sewa Ruangan Kantor pada Pemdes Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul oleh KPPD Bantul sebesar Rp 14.641.095,89; Beban Sewa Dibayar Dimuka berupa Sewa Ruangan Kantor pada Samsat Desa Sidomulyo oleh KPPD Bantul sebesar Rp 3.945.205,48 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka berupa Sewa Ruangan Kantor pada Pemdes Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo oleh KPPD Kulon Progo sebesar Rp 986.301,37 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp 618.897.806,00 dengan masa pertanggungungan mulai 21 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2023. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 276.384.499,67 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 342.513.306,33.
- b. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp622.726.815,00 dengan masa pertanggungungan mulai 21 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2023. Premi Asuransi Kendaraan Dinas tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 278.094.440,67 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 344.632.374,33.
- c. Sewa Ruangan Kantor milik Pemdes Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk pelayanan SAMSAT Desa sebesar Rp 16.000.000,00 dengan masa sewa 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2023. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp1.358.904,11 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 14.641.095,89.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- d. Sewa Ruangan Kantor untuk pelayanan SAMSAT Desa Sidomulyo sebesar Rp 16.000.000,00 dengan masa sewa 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 12.054.794,52 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 3.945.205,48
- e. Sewa Ruangan Kantor milik Pemdes Palihan Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo untuk Pelayanan SAMSAT Desa sebesar Rp 4.000.000,00 dengan masa sewa 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023. Sewa tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah diakui menjadi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp 3.013.698,63 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 986.301,37.

**Tabel III.69
Rincian Beban Dibayar Dimuka**

No	Nama Asura7411nsi	Tertanggung	Periode Pertanggung			No. Polis	Premi	Beban Dibayar Dimuka	
				s/d					
1.	PT Asuransi Sinar Mas	PEMDA DIY	21/07/22	s/d	20/07/23	12.100.0048.82902	618.897.806,00	01/01/23 s.d. 21/07/23	342.513.306,33
						12.200.0049.08356			
2.	PT Asuransi Sinar Mas	PEMDA DIY	21/07/22	s/d	20/07/23	12.200.0049.29589	622.726.815,00	01/01/23 s.d. 21/07/23	344.632.374,33
3.	Sewa Pemdes Argomulyo	Pemdes Argomulyo	01/12/22	s/d	30/11/23		16.000.000,00	01/12/22 s.d. 30/11/23	14.641.095,89
4.	Samsat Desa Sidomulyo	Pemdes Sidomulyo	01/04/22	s/d	31/03/23		16.000.000,00	01/01/23 s.d. 31/03/23	3.945.205,48
4.	Sewa Pemdes Palihan	Pemdes Palihan	01/04/22	s/d	31/03/23	934/7796	4.000.000,00	01/04/22 s.d. 31/03/23	986.301,37
Jumlah (Rp)									706.718.283,40

3.1.4.1.7. Persediaan

Rp 2.864.751.715,41

Rp 2.744.006.447,00

Saldo Persediaan BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.864.751.715,41 terdiri dari Barang Pakai Habis dengan menyesuaikan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan. Saldo Persediaan BPKA per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 120.745.268,41 atau 4,40% dari saldo Persediaan BPKA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.744.006.447,00 dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.70
Rincian Obyek Persediaan

No	URAIAN	2022	2021
1	Bahan	81.910.000,00	115.785.000,00
	-Bahan Kimia	-	1.260.000,00
	-Bahan Bakar dan Pelumas	81.910.000,00	114.525.000,00
2	Suku Cadang	-	-
	-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-
	-Suku Cadang Lainnya	-	-
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	2.782.531.715,41	2.628.221.447,00
	-Alat Tulis Kantor	1.069.259.213,72	1.142.589.937,00
	-Kertas Dan Cover	215.258.640,00	196.221.600,00
	-Bahan Cetak	428.466.390,00	119.830.700,00
	-Benda Pos	7.700.000,00	8.510.000,00
	-Bahan Komputer	839.726.635,00	889.394.000,00
	-Perabot Kantor	34.707.996,69	20.868.700,00
	-Alat Listrik	134.389.160,00	158.346.730,00
	-Perlengkapan Dinas	855.000,00	
	-Suvenir/Cendera Mata	2.625.600,00	7.548.600,00
	-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.543.080,00	84.911.180,00
	JUMLAH (Rp)	2.864.751.715,41	2.744.006.447,00

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.864.751.715,41 berasal dari saldo awal sebesar Rp 2.744.006.447,00 ditambah dengan belanja barang pakai habis pembentuk barang Persediaan sebesar Rp 6.346.660.234,00 dikurangi (Rp 6.251.402.240,59) karena adanya penggunaan atau pemanfaatan persediaan dimana di dalam pembebanan persediaan tersebut terdapat Rp 7.800.000,00 yang dibebankan oleh KPPD Kulon Progo atas mutasi antar unit ke KPPD Bantul serta ditambah Rp 17.687.275,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Reklasifikasi dari Persediaan berupa Bahan Lainnya ke Aset Tetap berupa Alat Rumah Tangga pada KPPD Gunungkidul sebesar (Rp 2.716.725,00)
- Reklasifikasi dari Persediaan berupa Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi ke Aset Tetap berupa Peralatan Jaringan pada KPPD Kota sebesar (Rp 3.600.000,00)
- Reklasifikasi dari Aset Tetap berupa Peralatan Komputer Lainnya ke Persediaan berupa Bahan Komputer pada KPPD Kota sebesar Rp 1.380.000,00
- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Electric Generating Set ke Persediaan berupa Bahan Bakar dan Pelumas pada KPPD Kota sebesar Rp 20.240.000,00
- Reklasifikasi dari Beban Sertifikasi ISO/Surveillance ke Persediaan berupa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada KPPD Kulon Progo sebesar Rp 384.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap berupa Alat Kantor Lainnya ke Persediaan berupa Alat Tulis Kantor pada KPPD Bantul sebesar Rp 2.000.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආයතන විභාගනු ලබන මුදල් පාලන කොමසාරිස්වරුන්ගේ
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Adapun mutasi persediaan BPKA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.71
Mutasi Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2021	Penyesuaian Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir 31 Desember 2022
				Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Bahan	115.785.000,00	-	566.173.946,00	600.048.946,00	81.910.000,00
	Bahan Kimia	1.260.000,00	-	1.779.089,00	3.039.089,00	-
	Bahan Bakar dan Pelumas	114.525.000,00	-	522.228.357,00	554.843.357,00	81.910.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman	-	-	500.000,00	500.000,00	-
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	40.622.500,00	40.622.500,00	-
	Bahan Lainnya	-	-	1.044.000,00	1.044.000,00	-
2	Suku Cadang	-	-	136.156.968,00	136.156.968,00	-
	Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	133.841.968,00	133.841.968,00	-
	Suku Cadang Alat Besar	-	-	550.000,00	550.000,00	-
	Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	1.765.000,00	1.765.000,00	-
	Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	2.628.221.447,00	-	5.669.816.595,00	5.515.196.326,59	2.782.841.715,41
	Alat Tulis Kantor	1.142.589.937,00	109.713.000,00	1.545.816.169,00	1.728.859.892,28	1.069.259.213,72
	Kertas dan Cover	196.221.600,00	-	286.954.106,00	267.917.066,00	215.258.640,00
	Bahan Cetak	119.830.700,00	(110.923.000,00)	1.871.481.400,00	1.451.922.710,00	428.466.390,00
	Benda Pos	8.510.000,00	-	22.760.000,00	23.570.000,00	7.700.000,00
	Bahan Komputer	889.394.000,00	1.210.000,00	1.358.635.961,00	1.409.513.326,00	839.726.635,00
	Perabot Kantor	20.868.700,00	-	143.032.645,00	129.193.348,31	34.707.996,69
	Alat Listrik	158.346.730,00	-	147.277.500,00	171.235.070,00	134.389.160,00
	Perlengkapan Dinas	-	-	127.550.000,00	126.695.000,00	855.000,00
	Suvenir/Cendera Mata	7.548.600,00	-	-	4.923.000,00	2.625.600,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	84.911.180,00	-	137.285.814,00	172.653.914,00	49.543.080,00
	Obat	-	-	11.639.000,00	11.639.000,00	-
	Natura	-	-	17.060.000,00	16.750.000,00	310.000,00
	Pakan	-	-	324.000,00	324.000,00	-
	JUMLAH (Rp)	2.744.006.447,00	-	6.372.147.509,00	6.251.402.240,59	2.864.751.715,41

Pada tanggal 28 Desember 2022, terdapat mutasi antar unit sebesar Rp 7.800.000,00 yang dikirim oleh KPPD Kulon Progo kepada KPPD Bantul berupa sampul plastik SKPD sebanyak 10 dus atau 20.000 lembar yang dicatat sebagai Alat Tulis Kantor berdasarkan BAST No 027/9909.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

**3.1.4.3.1. Investasi Jangka Panjang
 Non Permanen**

Rp 4.522.554.473,60

Rp 5.054.340.970,10

• **Dana Bergulir**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp 4.522.554.473,00 merupakan saldo Dana Bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY per 31 Desember 2021 sebesar Rp 9.277.844.764,00 dikurangi pelunasan sebesar (Rp 199.942.800,00) serta dikurangi penyisihan Dana Bergulir sebesar (Rp 4.555.347.490,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.74
 Tabel Mutasi Dana Bergulir**

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun	Nilai Pengguliran	Saldo 31-12-2021	Mutasi 2022		Saldo 31-12-2022	Penyisihan		Net Present Value	Keterangan
					Tambah	Kurang		%	Rp		
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		20.229.417.900,00	1.975.150.000,00	-	19.000.000,00	1.956.150.000,00		1.956.150.000,00	-	
	DPM PHP Th 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00	-	-	185.000.000,00	100%	185.000.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 th
	DPM PHP Th 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00	-	-	241.000.000,00	100%	241.000.000,00	-	
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	136.500.000,00	-	12.000.000,00	124.500.000,00	100%	124.500.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 th
	DPM LUEP	2011	3.569.417.900,00	1.412.650.000,00	-	7.000.000,00	1.405.650.000,00	100%	1.405.650.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 th
2	Dinas Koperasi dan UKM		31.732.100.000,00	2.729.194.764,00	-	85.942.800,00	2.643.251.964,00		2.411.197.490,40	232.054.473,60	
	Prospek Mandiri Campus Entrepreneur 2009	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	-	-	55.615.598,00	100%	55.615.598,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Perkuatan Permodalan bagi KUKS/UJKS Kop 2010	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	2010	3.000.000.000,00	168.057.582,00	-	-	168.057.582,00	100%	168.057.582,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	92.422.098,00	-	-	92.422.098,00	100%	92.422.098,00	-	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th
	Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006	2006	2.4292.500.000,00	567.715.775,00	-	-	567.715.775,00	100%	567.715.775,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 th
	Ketahanan Pangan 2007	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00	-	-	64.950.000,00	100%	64.950.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Prospek Mandiri 2007	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2007	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	-	-	50.800.000,00	100%	50.800.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Prospek Mandiri 2008	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Koperasi Karyawan 2008	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	2008	630.000.000,00	165.734.227,00	-	-	165.734.227,00	100%	165.734.227,00	-	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 th
	Pemberdayaan Koperasi 2011	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	-	-	239.912.400,00	100%	239.912.400,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	2011	2.500.000.000,00	400.736.502,00	-	-	400.736.502,00	100%	400.736.502,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	-	-	184.909.300,00	100%	184.909.300,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	2013	4.200.000.000,00	86.560.178,00	-	-	86.560.178,00	100%	86.560.178,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	2016	3.500.000.000,00	38.652.204,00	-	8.332.600,00	30.319.604,00	10%	3.031.960,40	27.287.643,60	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	169.807.300,00	-	10.943.800,00	158.863.500,00	10%	15.886.350,00	142.977.150,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	135.321.600,00	-	66.666.400,00	68.655.200,00	10%	6.865.520,00	61.789.680,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 th
3	BUKP		14.000.000.000,00	4.440.000.000,00	-	95.000.000,00	4.345.000.000,00		54.500.000,00	4.290.500.000,00	
	Tahun 2019	2019	10.000.000.000,00	440.000.000,00	-	95.000.000,00	345.000.000,00	10%	34.500.000,00	310.500.000,00	
	Tahun 2020	2020	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00	0,5%	20.000.000,00	3.980.000.000,00	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan		2.915.000.000,00	133.500.000,00	-	-	133.500.000,00		133.500.000,00	-	
	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	-	-	133.500.000,00	100%	133.500.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 th
	JUMLAH		68.876.517.900,00	9.277.844.764,00	-	199.942.800,00	9.077.901.964,00		4.555.347.490,40	4.522.554.473,60	



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.3.2. Investasi Jangka Panjang Permanen Rp 1.950.495.052.556,86 Rp 1.696.428.576.600,55

• **Penyertaan Modal**

Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.950.495.052.556,86 merupakan penyertaan modal yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Anggaran 2022, baik dari LK BUMD Audited (apabila sudah tersedia) dan LK BUMD Unaudited yang akan disesuaikan dengan LK BUMD Audited di tahun berikutnya. Pada PT Bank BPD DIY, penyertaan modal langsung dihitung dari besarnya bagian Pemda DIY dalam Ekuitas yang dilaporkan dalam LK Audited PT. Bank BPD DIY sebesar 51,000% dikali dengan Rp 3.207.624.960.017,00 sehingga menghasilkan penyertaan modal atas PT. Bank BPD DIY sebesar Rp 1.635.888.729.608,67.

Tabel III.75
Tabel Mutasi Penyertaan Modal berdasarkan LK Audited BUMD TA 2022

No	Perusahaan Daerah	% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2021 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	Mutasi Tahun Anggaran 2022			Penyertaan Modal 2022 (Audited)
					% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2022 (LK BUMD)	Laba/Rugi BUMD Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	
1	METODE EKUITAS PT. Bank BPD DIY	51,000%	2.668.660.000.000,00	1.361.016.600.000,00	51,000%	3.207.624.960.017,00	1.635.888.729.608,67	1.635.888.729.608,67
	JUMLAH		2.668.660.000.000,00	1.361.016.600.000,00		3.207.624.960.017,00	1.635.888.729.608,67	1.635.888.729.608,67

Pada PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI), PT. Tarumartani, BUKP, Perumda Air Bersih Tirtatama DIY, dan PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) penyertaan modal dihitung dari saldo awal sebesar Rp 332.803.041.759,26 dikurangi dengan penyesuaian berdasarkan LK Audited Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp 8.651.142.430,25) sehingga Ekuitas Bagian Pemda DIY menjadi sebesar Rp 324.151.899.328,81 kemudian dikurangi dengan Dividen Tahun 2021 yang disetor ke BUD sebesar (Rp 12.478.447.898,58) ditambah bagian Pemda DIY atas Laba/Rugi BUMD Tahun 2022 sebesar Rp 2.753.792.074,95 sehingga menghasilkan penyertaan modal PT. AMI, PT. Tarumartani, BUKP, Perumda Air Bersih Tirtatama DIY, dan PT. ABA sebesar Rp 314.606.322.948,19.

Tabel III.76
Tabel Mutasi Penyertaan Modal berdasarkan LK Unaudited BUMD TA 2022

No	Perusahaan Daerah	% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2021 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	Mutasi Tahun Anggaran 2022			Penyertaan Modal 2022 (Audited)
					Deviden Tahun 2021 yang disetor ke BUD	Laba/Rugi BUMD Tahun 2022	Laba/Rugi BUMD Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	
1	METODE EKUITAS PT. AMI	99,951%	40.579.444.105,00	40.559.560.177,39	1.229.058.069,00	1.879.030.712,22	1.878.109.987,17	41.208.612.095,56
2	PT. Tarumartani	99,996%	69.094.542.919,00	69.091.779.137,28	5.439.572.184,00	10.247.107.313,84	10.246.697.429,54	73.898.904.382,83
3	BUKP	83,140%	55.962.092.591,00	46.526.883.780,16	5.630.738.202,58	1.716.043.104,56	1.426.718.237,13	42.322.863.814,71
4	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY	100,000%	166.783.676.233,98	166.783.676.233,98	-	(10.797.733.578,89)	(10.797.733.578,89)	155.985.942.655,09
5	METODE HARGA PEROLEHAN PT. ABA	0,223%	-	1.190.000.000,00	179.079.443,00	-	-	1.190.000.000,00
	JUMLAH		332.419.755.848,98	324.151.899.328,81	12.478.447.898,58	3.044.447.551,73	2.753.792.074,95	314.606.322.948,19
	TOTAL		3.001.079.755.848,98	1.685.168.499.328,81	3.220.103.407.915,58	3.210.669.407.568,73	1.638.642.521.683,63	1.950.495.052.556,86



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦢꦤ꧀ꦢꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦺꦁ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Total Penyertaan Modal sebesar Rp 1.950.495.052.556,86 merupakan penyertaan modal yang didapat dari Laporan Keuangan Audited PT. Bank BPD DIY TA 2022 sebesar Rp 1.635.888.729.608,67 ditambah dengan penyertaan modal yang didapat dari Laporan Keuangan Unaudited PT. AMI, PT. Tarumartani, Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP), Perumda Air Bersih Tirtatama DIY, dan PT. ABA sebesar Rp 314.606.322.948,19.

Perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Taru Martani, dan BUKP menggunakan Metode Ekuitas sedangkan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan Metode Harga Perolehan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp 1.635.888.729.608,67. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Bank BPD DIY per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas BUMD TA 2022 (Berdasarkan LK Audited TA 2022)	Rp 2.668.660.000.000,00	Rp 2.668.660.000.000,00
• Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	51,000% x Rp 2.668.660.000.000,00	Rp 1.635.888.729.608,67
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		Rp 1.635.888.729.608,67

b. Penyertaan Modal pada PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp 41.208.612.095,56. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2021	99,951% x Rp 40.579.444.105,00	Rp 40.559.560.177,39
• Tambahan Modal Disetor		-
• Deviden Tahun 2021 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2022		(Rp 1.229.058.069,00)
• Laba Tahun 2022	Rp 1.879.030.712,22	
• Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	99,951% x Rp 1.879.030.712,22	Rp 1.878.109.987,17
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		Rp 41.208.612.095,56

c. Penyertaan Modal pada PT. Taru Martani sebesar Rp 73.898.904.382,83. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Taru Martani per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2021	99,996% x Rp 69.094.542.919,00	Rp 69.091.779.137,28
• Tambahan Modal Disetor		-
• Deviden Tahun 2021 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2022		(Rp 5.439.572.184,00)
• Laba Tahun 2022	Rp 10.247.107.313,84	
• Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	99,996% x Rp 10.247.107.313,84	Rp 10.246.697.429,54
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		Rp 73.898.904.382,83



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦺꦢꦤ꧀ꦠꦺꦁꦤꦏꦺꦁꦸꦁꦤ꧀ꦢꦺꦁ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sebesar Rp 42.322.863.814,71. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2021	83,140% x Rp 55.962.092.591,00	Rp 46.526.883.780,16
• Tambahan Modal Disetor		-
• Deviden Tahun 2021 yang Disetor ke Pemda DIY Tahun 2022		(Rp 5.630.738.202,58)
• Laba Tahun 2022	Rp 1.716.043.104,56	
• Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	83,140% x Rp 1.716.043.104,56	Rp 1.426.718.237,13
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		Rp 42.322.863.814,71

e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebesar Rp 155.985.942.655,09. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2021	100,00% x Rp 166.783.676.233,98	Rp 166.783.676.233,98
• Tambahan Modal Disetor		-
• Laba Tahun 2022	(Rp 10.797.733.578,89)	
• Laba Tahun 2022 Bagian Pemda DIY	100,00% x (Rp 10.797.733.578,89)	(Rp 10.797.733.578,89)
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022		Rp 155.985.942.655,09

f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp 1.190.000.000,00 adalah modal disetor sebesar 0,223% dari seluruh Modal PT. Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode perolehan dengan perhitungan sebagai berikut:

• Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31 Desember 2021	Rp 1.190.000.000,00
• Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2022	Rp 1.190.000.000,00

Pada Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY menambah penyertaan modal sebesar Rp 130.000.000,00 dari saldo semula Rp 310.000.000,00. Pada Tahun 2017, Pemerintah Daerah DIY menambah penyertaan modal Rp 220.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2017 saldo adalah sebesar Rp 660.000.000,00. Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY menambah penyertaan modal Rp 90.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2020 saldo penyertaan modal adalah sebesar Rp 750.000.000,00. Pada Tahun 2021 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp 440.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2021 saldo penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebesar Rp 1.190.000.000,00.

Pada Tahun 2022 tidak terdapat penambahan modal disetor sehingga saldo penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.190.000.000,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂිත ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රතිපාදන මාර්ගෝපදේශයකින් යුතුව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

2022 **2021 (audited)**
3.1.4.2. Aset Tetap **Rp 862.374.245.423,62** **Rp 861.480.492.934,72**

Aset Tetap BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 862.374.245.423,62 merupakan nilai buku Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp 991.955.235.776,50 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp 129.580.990.352,88). Aset Tetap BPKA per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 893.752.488,90 atau 0,1% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 861.480.492.934,72 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.76
Rincian Aset Tetap**

No.	URAIAN	2022	2021
1	Tanah	623.892.994.353,00	691.358.769.393,00
2	Peralatan dan Mesin	137.711.134.229,40	91.823.504.813,40
3	Gedung dan Bangunan	169.983.905.984,00	173.098.787.975,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.391.984.618,10	5.855.767.351,00
5	Aset Tetap Lainnya	508.360.692,00	234.400.692,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.466.855.900,00	1.545.502.700,00
	JUMLAH (Rp)	991.955.235.776,50	963.916.732.924,40
7	Akumulasi Penyusutan	(129.580.990.352,88)	(102.436.239.989,68)
	JUMLAH (Rp)	862.374.245.423,36	861.480.492.934,72

3.1.4.2.1. Tanah **Rp 623.892.994.353,00** **Rp 691.358.769.393,00**

Saldo Tanah BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 623.892.994.353,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 67.465.775.040,00) atau (9,76%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 691.358.769.393,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Mutasi (bertambah) Tanah sebesar Rp 4.168.000.000,00 berasal dari:**
 - Mutasi masuk Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Balai Pelatihan Kesehatan ke BPKA (induk) sebesar Rp 650.000.000,00
 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya berupa Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) ke Tanah Lapangan Parkir pada BPKA (induk) sebesar Rp 3.518.000.000,00
- **Mutasi (berkurang) Tanah sebesar (Rp 71.633.775.040,00) berasal dari:**
 - Mutasi keluar Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja ke OPD lain sebesar (Rp 62.325.525.040,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - BPKA (induk) ke Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan sebesar (Rp 1.726.000.000,00)
 - BPKA (induk) ke Dinas Pariwisata sebesar (Rp 60.201.425.040,00)
 - BPKA (induk) ke SMK Negeri 1 Sewon sebesar (Rp 264.600.000,00)
 - BPKA (induk) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp 133.500.000,00)
 - Diusulkan untuk dihapus karena rusak berat/usang sebesar (Rp 4.920.000.000,00)
 - Reklasifikasi Tanah ke Aset Lainnya—Sewa sebesar (Rp 4.388.250.000,00) dengan rincian:
 - Reklasifikasi Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja ke Sewa sebesar (Rp 870.250.000,00)
 - Reklasifikasi Tanah Lapangan Parkir ke Sewa sebesar (Rp 3.518.000.000,00)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමය පාලන කළමනාකරු සේවකර්මාංශය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.77
Rincian Mutasi Tanah

TANAH	
SALDO AWAL	691.358.769.393,00
Penambahan:	
Mutasi dari OPD Lain	650.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	3.518.000.000,00
JUMLAH (Rp)	4.168.000.000,00
Pengurangan:	
Mutasi ke OPD Lain	(62.325.525.040,00)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(4.388.250.000,00)
Usulan Penghapusan	(4.920.000.000,00)
JUMLAH (Rp)	(71.633.775.040,00)
SALDO AKHIR	623.892.994.353,00

Tabel III.78
Rincian Tanah

No	URAIAN	2022	2021
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.833.729.500,00	3.833.729.500,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	43.965.041.600,00	43.965.041.600,00
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	406.588.614.853,00	474.054.389.893,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	675.100.000,00	675.100.000,00
5	Tanah Persil Lainnya	46.131.584.000,00	46.131.584.000,00
6	Tanah Lapangan Olahraga	32.516.450.000,00	32.516.450.000,00
7	Tanah Lapangan Parkir	90.182.474.400,00	90.182.474.400,00
	JUMLAH (Rp)	623.892.994.353,00	691.358.769.393,00

3.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin **Rp 137.711.134.229,40** **Rp 91.823.504.813,40**

Saldo Peralatan dan Mesin BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 137.711.134.229,40 mengalami kenaikan sebesar Rp 45.887.629.416,00 atau 49,97% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 91.823.504.813,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.79
Rincian Peralatan dan Mesin

No.	URAIAN	2022	2021
1	Alat Besar	11.277.550.250,00	11.219.246.250,00
2	Alat Angkutan	53.853.766.442,00	11.229.186.442,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.299.010.725,00	1.243.197.000,00
4	Alat Pertanian	49.338.000,00	53.188.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.748.492.867,41	43.022.705.255,42
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.950.597.940,00	5.466.668.242,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	133.040.000,00	132.200.000,00
8	Alat Laboratorium	919.345.000,00	916.695.000,00
9	Komputer	18.694.624.004,99	18.381.209.623,98
10	Alat Keselamatan Kerja	70.614.000,00	70.614.000,00
11	Rambu-Rambu	630.360.000,00	4.200.000,00
12	Peralatan Olahraga	84.395.000,00	84.395.000,00
	JUMLAH (Rp)	137.711.134.229,40	91.823.504.813,40



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Mutasi (bertambah) Peralatan dan Mesin sebesar Rp 49.899.367.277,00 berasal dari:**
 - Belanja Modal Peralatan dan dan Mesin BPKA sebesar Rp 4.068.274.410,00
 - Hibah Masuk sebesar Rp 42.837.200.000,00 yang berasal dari:
 - Bank BPD DIY ke BPKA (induk) sebesar Rp 687.200.000,00
 - Kementerian Perhubungan ke BPKA (induk) sebesar Rp 42.150.000.000,00
 - Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BPKA menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp 164.816.725,00
 - Mutasi Masuk dari OPD lain sebesar Rp 2.829.076.142,00 yang berasal dari:
 - Bappeda ke BPKA (induk) sebesar Rp 370.430.742,00
 - Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ke BPKA (induk) sebesar Rp 81.180.000,00
 - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 80.460.000,00
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke BPKA (induk) sebesar Rp 32.790.000,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke BPKA (induk) sebesar Rp 66.000.000,00
 - Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 184.114.000,00
 - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 1.776.699.000,00
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota ke BPKA (induk) sebesar Rp 237.402.400,00

- **Mutasi (berkurang) Peralatan dan Mesin sebesar (Rp 4.011.737.861,00) berasal dari:**
 - Mutasi keluar OPD sebesar (Rp 1.198.171.242,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - BPKA (induk) ke Balai Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp 140.540.500,00)
 - BPKA (induk) ke Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol sebesar (Rp 687.200.000,00)
 - BPKA (induk) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp 370.430.742,00)
 - Aset Ekstrakompatibel sebesar (Rp 9.824.997,00)
 - Reklasifikasi ke Persediaan sebesar (Rp 3.380.000,00)
 - Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar (Rp 49.942.000,00)
 - Diusulkan untuk dihapus karena rusak berat/usang sebesar (Rp 2.750.419.622,00)

Tabel III.80
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

PERALATAN DAN MESIN	
SALDO AWAL	91.823.504.813,40
Penambahan:	
Belanja Modal	4.068.274.410,00
Hibah Masuk	42.837.200.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	164.816.725,00
Mutasi Masuk dari OPD Lain	2.829.076.142,00
JUMLAH (Rp)	49.899.367.277,00
Pengurangan:	
Mutasi keluar OPD	(1.198.171.242,00)
Aset Ekstrakompatibel	(9.824.997,00)
Reklasifikasi ke Persediaan	(3.380.000,00)
Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(49.942.000,00)
Usulan Penghapusan	(2.750.419.622,00)
JUMLAH (Rp)	(4.011.737.861,00)
SALDO AKHIR	137.711.134.229,40



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2022	2021 (audited)
3.1.4.2.3. Gedung dan Bangunan	<u>Rp 169.983.905.984,00</u>	<u>Rp 173.098.787.975,00</u>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 169.983.905.984,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 3.114.881.991,00) atau (1,80%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 173.098.787.975,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III.81
Rincian Gedung dan Bangunan

No.	URAIAN	2022	2021
1	Bangunan Gedung	164.882.969.484,00	170.869.378.975,00
2	Monumen	3.240.527.500,00	-
3	Bangunan Menara	30.300.000,00	30.300.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.830.109.000,00	2.199.109.000,00
JUMLAH (Rp)		169.983.905.984,00	173.098.787.975,00

- **Mutasi (bertambah) Gedung dan Bangunan sebesar Rp 5.701.152.009,00 berasal dari:**
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPKA Tahun 2022 sebesar Rp 285.394.680,00
 - Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BPKA menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp 509.098.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 106.000.000,00
 - Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp 403.098.300,00
 - Hibah Masuk sebesar Rp 117.527.936,00 yang berasal dari:
 - Badan Pengawas Pemilu ke BPKA (induk) sebesar Rp 117.527.936,00
 - Mutasi Masuk dari OPD lain sebesar Rp 4.499.426.843,00 yang berasal dari:
 - Balai Pelatihan Kesehatan ke BPKA (induk) sebesar Rp 671.415.791,00
 - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 24.337.000,00
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke BPKA (induk) sebesar Rp 544.436.552,00
 - Sekretariat Dinas Perhubungan ke BPKA (induk) sebesar Rp 18.710.000,00
 - Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 1.004.091.500,00
 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Rp 2.236.436.000,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap dalam Renovasi ke Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 289.704.250,00

- **Mutasi (berkurang) Gedung dan Bangunan sebesar (Rp 8.816.034.000,00) yang berasal dari:**
 - Mutasi Keluar ke OPD lain sebesar (Rp 8.816.034.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - BPKA (induk) ke Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan sebesar (Rp 17.550.000,00)
 - BPKA (induk) ke Dinas Pariwisata sebesar (Rp 7.233.000.000,00)
 - BPKA (induk) ke SMK Negeri 1 Sewon sebesar (Rp 759.369.000,00)
 - BPKA (induk) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp 806.115.000,00)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.82

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

GEDUNG DAN BANGUNAN	
SALDO AWAL	173.098.787.975,00
Penambahan:	
Belanja Modal	285.394.680,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	509.098.300,00
Hibah Masuk	117.527.936,00
Mutasi Masuk dari OPD Lain	4.499.426.843,00
ATR Gedung	289.704.250,00
JUMLAH (Rp)	5.701.152.009,00
Pengurangan:	
Mutasi Keluar ke OPD Lain	(8.816.034.000,00)
JUMLAH (Rp)	(8.816.034.000,00)
SALDO AKHIR	169.983.905.984,00

	2022	2021 (audited)
3.1.4.2.4. <u>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</u>	<u>Rp 53.391.984.618,10</u>	<u>Rp 5.855.767.351,00</u>

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 53.391.984.618,10 mengalami kenaikan sebesar Rp 47.536.217.267,10 atau 811,70% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 5.855.767.351,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.83

Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	URAIAN	2022	2021
1	Jalan dan Jembatan	25.859.487.110,00	200.000.000,00
2	Bangunan Air	18.745.966.715,00	1.729.177.901,00
3	Instalasi	587.574.250,00	537.632.250,00
4	Jaringan	8.198.956.543,10	3.388.957.200,00
JUMLAH (Rp)		53.391.984.618,10	5.855.767.351,00

- **Mutasi (bertambah) Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA sebesar Rp 47.757.217.267,10 berasal dari:**
 - Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 49.942.000,00
 - Mutasi Masuk dari OPD Lain sebesar Rp 47.707.275.267,10 yang berasal dari:
 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral ke BPKA (induk) sebesar Rp 5.292.971.500,00
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ke BPKA (induk) sebesar Rp 220.000.000,00
 - Dinas Kebudayaan sebesar Rp 100.000.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 42.194.903.767,10



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Mutasi (berkurang) Jalan, Jaringan, dan Irigasi BPKA sebesar (Rp 221.000.000,00) berasal dari:**
 - Mutasi Keluar ke OPD lain sebesar (Rp 221.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - BPKA (induk) ke Dinas Pariwisata sebesar (Rp 221.000.000,00)

Tabel III.84
Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	
SALDO AWAL	5.855.767.351,00
Penambahan:	
Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.942.000,00
Mutasi Masuk dari OPD Lain	47.707.275.267,10
JUMLAH (Rp)	47.757.217.267,10
Pengurangan:	
Mutasi Keluar ke OPD Lain	221.000.000,00
JUMLAH (Rp)	221.000.000,00
SALDO AKHIR	53.391.984.618,10

	2022	2021 (audited)
3.1.4.4. Aset Tetap Lainnya	Rp 508.360.692,00	Rp 234.400.692,00

Saldo Aset Tetap Lainnya BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 508.360.692,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 273.960.000,00 atau 116,88% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 234.400.692,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.85
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	URAIAN	2022	2021
1	Bahan Perpustakaan	216.950.691,00	216.950.691,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	276.560.001,00	2.600.001,00
3	Tanaman	14.850.000,00	14.850.000,00
JUMLAH (Rp)		508.360.692,00	234.400.692,00

- **Mutasi (bertambah) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 563.664.250,00 berasal dari:**
 - Mutasi Masuk dari OPD Lain sebesar Rp 563.664.250,00 yang berasal dari:
 - Badan Kepegawaian Daerah ke BPKA (induk) sebesar Rp 289.704.250,00
 - Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 273.960.000,00
- **Mutasi (berkurang) Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp 289.704.250,00) berasal dari:**
 - Reklasifikasi Aset Tetap dalam Renovasi ke Bangunan Gedung Kantor sebesar (Rp 289.704.250,00)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.86
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP LAINNYA	
SALDO AWAL	234.400.692,00
Penambahan:	
Mutasi Masuk dari OPD Lain	563.664.250,00
JUMLAH (Rp)	563.664.250,00
Pengurangan:	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	289.704.250,00
JUMLAH (Rp)	289.704.250,00
SALDO AKHIR	508.360.692,00

	2022	2021 (audited)
3.1.4.5. <u>Konstruksi Dalam Pengerjaan</u>	<u>Rp 6.466.855.900,00</u>	<u>Rp 1.545.502.700,00</u>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.466.855.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.921.353.200,00 atau 318,43% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 1.545.502.700,00 pada BPKA (induk) selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

- **Mutasi (bertambah) Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 6.065.538.700,00 berasal dari:**
 - Hibah Masuk sebesar Rp 4.754.632.000,00 yang berasal dari:
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke BPKA (induk) sebesar Rp 4.754.632.000,00
 - Mutasi Masuk dari OPD Lain sebesar Rp 1.310.906.700,00 yang berasal dari:
 - Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ke BPKA (induk) sebesar Rp 89.000.000,00
 - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 263.071.000,00
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ke BPKA (induk) sebesar Rp 862.035.700,00
 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ke BPKA (induk) sebesar Rp 96.800.000,00

- **Mutasi (berkurang) Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar (Rp 1.144.185.500,00) berasal dari:**
 - Usulan Penghapusan sebesar (Rp 1.144.185.500,00)

Tabel III.87
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
SALDO AWAL	416.150.700,00
Penambahan:	
Hibah Masuk	4.754.632.000,00
Mutasi Masuk dari OPD Lain	1.310.906.700,00
JUMLAH (Rp)	6.065.538.700,00
Pengurangan:	
Usulan Penghapusan	(1.144.185.500,00)
JUMLAH (Rp)	(1.144.185.500,00)
SALDO AKHIR	6.466.855.900,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකාරී පාලන කළමනාකරණ සේවාවක් සැපයීම සඳහා

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

2022 **2021 (audited)**

3.1.4.6. Akumulasi Penyusutan **(Rp 129.580.990.352,88)** **(Rp 102.436.239.989,42)**

Saldo Akumulasi Penyusutan BPKA per 31 Desember 2022 sebesar (Rp 129.580.990.352,88) berasal dari saldo awal Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 102.436.239.989,42); ditambah dengan mutasi masuk Akumulasi Penyusutan tahun 2022 sebesar (Rp 14.220.166.327,46); ditambah dengan pembebanan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selain Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 sebesar (Rp 16.914.366.699,48); dikurangi dengan mutasi keluar Akumulasi Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp 1.261.388.684,44; serta dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan aset yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp 2.728.393.979,04; dan dikurangi dengan Koreksi BPK atas lebih catat akumulasi penyusutan sebesar Rp 0,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.88
Rincian Akumulasi Penyusutan

No.	URAIAN	2022	2021
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(86.669.162.051,18)	(74.738.684.518,39)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(29.984.240.906,15)	(26.848.394.593,66)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(12.927.587.395,55)	(849.160.877,37)
JUMLAH (Rp)		(129.580.990.352,88)	(102.436.239.989,42)

2022 **2021 (audited)**

3.1.4.4. Aset Lainnya **Rp 169.784.926.202,54** **Rp 102.302.563.757,56**

Aset Lainnya meliputi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF). Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 169.784.926.202,54 merupakan nilai buku Aset Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp 195.853.665.736,00; dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar (Rp 35.172.195.005,22); dan dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp 2.621.240.885,24). Pencatatan Aset Rusak Berat/Usang di Neraca langsung menggunakan nilai buku yaitu sebesar Rp 142.378.336,76. Terdapat Koreksi BPK untuk mengakui TDF dari Kementerian Keuangan yang ditransfer secara non tunai namun belum ditarik atau ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 11.724.696.357,00 sehingga Aset Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel III.89
Rincian Aset Lainnya

No.	URAIAN	2022
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	186.527.877.398,00
2	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	(35.172.195.005,22)
JUMLAH (Rp)		151.355.682.392,78
3	Aset Rusak Berat/Usang	2.763.619.222,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(2.621.240.885,24)
JUMLAH (Rp)		142.378.336,76
5	Aset Tidak Berwujud	6.562.169.116,00
6	Transfer Deposit Facility (TDF)	11.724.696.357,00
JUMLAH (Rp)		18.286.865.473,00
TOTAL (Rp) Aset Lainnya		169.784.926.202,54



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Mutasi (bertambah) Aset Lainnya sebesar Rp 88.888.482.542,24 berasal dari:**
 - Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa BPKA tahun 2022 sebesar Rp 284.012.300,00
 - Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 134.906.000,00
 - Kapitalisasi Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 149.106.300
 - Hibah Masuk sebesar Rp 29.000.000,00 yang berasal dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY ke BPKA (induk) sebesar Rp 29.000.000,00
 - Mutasi Masuk dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sebesar Rp 104.830.000,00
 - Appraisal aset yang disewakan kepada PT Setia Mataram Tritunggal sebesar Rp 67.908.849.000,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp 2.625.003.122,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp 6.189.602.000,00
 - Koreksi BPK untuk mengakui Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp 11.724.696.357,00.
- **Mutasi (berkurang) Aset Lainnya sebesar (Rp 9.736.602.000,00) berasal dari:**
 - Mutasi Keluar dari BPKA (induk) ke Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar (Rp 29.000.000,00)
 - Reklasifikasi Aset Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) ke Aset Tetap pada BPKA (induk) sebesar (Rp 3.518.000.000,00)
 - Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar (Rp 6.189.602.000,00)

Tabel III.90
Rincian Mutasi Aset Lainnya

ASET LAINNYA	
SALDO AWAL	102.302.563.757,76
AKUMULASI PENYUSUTAN	26.123.917.793,00
Penambahan:	
Koreksi BPK Pengakuan TDF	11.724.696.357,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	284.012.300,00
Hibah Masuk	29.000.000,00
Mutasi Masuk dari OPD Lain	104.830.000,00
Appraisal PT Setia Mataram Tritunggal	67.908.849.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	8.814.605.122,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang yang Langsung dicatat sebesar Nilai Buku di Neraca 2021	22.489.763,24
JUMLAH (Rp)	88.888.482.542,24
Pengurangan:	
Mutasi Keluar ke OPD Lain	(29.000.000,00)
Reklasifikasi BGS/BSG ke Aset Tetap	(3.518.000.000,00)
Penghapusan Aset yang Tidak Digunakan	(6.189.602.000,00)
JUMLAH (Rp)	(9.736.602.000,00)
Akumulasi Penyusutan Sewa	(35.172.195.005,22)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(2.621.240.885,24)
SALDO AKHIR	169.784.926.202,54



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦏꦸꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp 186.527.877.398,00 Rp 122.137.028.398,00

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 151.355.682.392,78 mengalami kenaikan sebesar Rp 64.390.849.000,00 atau 52,72% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 122.137.028.398,00. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi Sewa sebesar Rp 151.355.682.392,78 yang merupakan nilai buku Sewa dengan total harga perolehan sebesar Rp 186.527.877.398,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Sewa sebesar (Rp 35.172.195.005,22).

Tabel III.91
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	URAIAN	2022	2021
1	Sewa	186.527.877.398,00	118.619.028.398,00
2	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	3.518.000.000,00
3	Kerjasama Pemanfaatan	-	-
	JUMLAH (Rp)	186.527.877.398,00	122.137.028.398,00
4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(35.172.195.005,22)	(26.123.917.793,20)
	JUMLAH (Rp)	151.355.682.392,78	96.013.110.604,80

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.518.000.000,00 merupakan aset tanah yang dikelola secara Bangun Guna Serah oleh PT Yogya Indah Sejahtera (PT YIS) dengan mekanisme Perjanjian Bersama/Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta Nomor 53 mulai tanggal 12 September 1992. Masa perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun dan telah berakhir pada Tahun 2022. Setelah perjanjian berakhir maka tanah dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2022 BPKA DIY sebagai Pejabat Pengelola Aset Pemda DIY sudah tidak mengakui adanya Aset Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna serta seluruh aset tetapnya telah diakui sebagai aset yang disewakan kepada PT Setia Mataram Tritunggal sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa melalui appraisal.

3.1.4.4.2. Aset Tidak Berwujud Rp 6.562.169.116,00 Rp 6.173.326.816,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tidak Berwujud adalah *software*, *website*, *lisensi*, *franchise*, hak cipta, paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, serta DED. Saldo Aset Tak Berwujud BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.562.169.116,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 388.842.300,00 atau 6,30% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 6.173.326.816,00 dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමය පාලන කමිටුවේ පාලන කාර්ය මණ්ඩලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.92
Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	URAIAN	2022	2021
1	Software	233.406.000,00	5.792.221.816,00
2	Kajian	-	381.105.000,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.328.763.116,00	-
JUMLAH (Rp)		6.562.169.116,00	6.173.326.816,00

- **Saldo Software pada BPKA sebesar Rp 233.406.000,00 memiliki rincian sebagai berikut:**
- Software Antrian sebesar Rp 117.000.000,00
 - Software Aplikasi Laporan Realisasi Pendapatan sebesar Rp 40.000.000,00
 - Software Aplikasi Cetak Notice Thermal, QR Code dan Display Running Text sebesar Rp 53.306.000,00
 - Software Pelayanan MPP (Mall Pelayanan Publik) sebesar Rp 23.100.000,00
- **Saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya pada BPKA sebesar Rp 6.328.763.116,00 memiliki rincian sebagai berikut:**
- Modul Kepolisian sebesar Rp 14.000.000,00
 - Modul Pelayanan sebesar Rp 24.500.000,00
 - Modul Kepala Dinas sebesar Rp 12.000.000,00
 - Modul Cetak Khusus sebesar Rp 26.000.000,00
 - Modul Pelaporan sebesar Rp 26.000.000,00
 - Software Kesamsatan, Pemisahan dari jaringan komputer sebesar Rp 85.000.000,00
 - Software Aplikasi Kearsipan sebesar Rp 41.600.000,00
 - Aplikasi Online Samsat sebesar Rp 200.300.595,00
 - Aplikasi Tunggalan PKB dan BBN KB sebesar Rp 38.000.000,00
 - Software Aplikasi Bebas BBN II dan Penambahan 1 Hari sebesar Rp 76.000.000,00
 - Program Aplikasi Percepatan Pelayanan sebesar Rp 44.650.000,00
 - Software Aplikasi Program Percepatan Pelayanan sebesar Rp 44.650.000,00
 - Aplikasi Program Pelayanan Kesamsatan sebesar Rp 44.650.000,00
 - Software sebesar Rp 44.650.000,00
 - Software Aplikasi Pembebasan BBNKB sebesar Rp 60.000.000,00
 - Aplikasi System Informasi DPPKA DIY sebesar Rp 15.000.000,00
 - Software Online BPKB sebesar Rp 27.750.000,00
 - Software Online Interaktif Webside DPPKA sebesar Rp 27.300.000,00
 - Pengembangan Software SIMA sebesar Rp 39.457.000,00
 - Software Samsat Gerai sebesar Rp 28.600.000,00
 - SMS Jatuh Tempo sebesar Rp 59.000.000,00
 - Sistem Aplikasi Pengembalian Dana Bergulir sebesar Rp 93.000.000,00
 - Modul Aplikasi SMS Jatuh Tempo sebesar Rp 34.500.000,00
 - Software Aplikasi SMS Jatuh Tempo sebesar Rp 59.000.000,00
 - Software Modul Aplikasi SMS Jatuh Tempo sebesar Rp 34.500.000,00
 - Software Barang Pakai Habis sebesar Rp 97.988.750,00
 - Software Aplikasi Pajak Progresif sebesar Rp 94.450.000,00
 - Aplikasi Simpeg BUKP sebesar Rp 49.885.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකෘතිමය පාලන කළමනාකරණ සහ සේවා කොට්ඨාසය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Aplikasi Server Online Induk sebesar Rp 37.500.000,00
- Software Aplikasi Pengembangan dan Customisasi Aplikasi Kesamsatan sebesar Rp 99.000.000,00
- Aplikasi Pelayanan Samsat loket Khusus sebesar Rp 44.865.000,00
- Software sebesar Rp 33.000.000,00
- Software Pengembangan dan Customisasi Aplikasi Kesamsatan sebesar Rp 66.900.000,00
- Pengembangan dan Customisasi Aplikasi Kesamsatan sebesar Rp 43.000.000,00
- Aplikasi Scanner Surat Ketetapan Pajak daerah sesuai SPK no.027.15/0908 sebesar Rp 66.350.000,00
- Pengembangan dan Costumisasi Aplikasi Kesamsatan sebesar Rp 70.000.000,00
- Software Aplikasi Online Gerai Samsat Galeria sebesar Rp 43.750.000,00
- Aplikasi Barcode sebesar Rp 64.670.000,00
- Aplikasi / Software Barcode sebesar Rp 45.112.221,00
- Aplikasi Scanner Barcode STNK sebesar Rp 63.800.000,00
- Aplikasi Informasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 42.548.000,00
- Software Microcontroler/ Aplikasi Multimedia sebesar Rp 29.800.000,00
- Aplikasi SIARDI sebesar Rp 14.500.000,00
- Software BPKB sebesar Rp 48.325.000,00
- Software Aplikasi Input BPKB sebesar Rp 97.180.000,00
- Aplikasi Input BPKB On Line sebesar Rp 48.000.000,00
- Window Server 2012 Single License sebesar Rp 11.500.000,00
- Software Load Balancer sebesar Rp 99.990.000,00
- Software Aplikasi Pelayanan (SIARDI) sebesar Rp 49.825.000,00
- Software Aplikasi System Arsip Digital sebesar Rp 49.450.000,00
- Software Multimedia Interaktif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 53.625.000,00
- Microsoft Office Power Point 2007 & Visio Pro 2010 sebesar Rp 13.400.000,00
- Windows 7 Profesional 32bit English sebesar Rp 34.400.000,00
- Adobe Primer Pro CS5 sebesar Rp 18.320.000,00
- Adobe Captivate 5 sebesar Rp 18.320.000,00
- Software Aplikasi Pengesahan SKPD sebesar Rp 95.500.000,00
- Software Cetak SKPD EPOSTY sebesar Rp 47.500.000,00
- Software Aplikasi Samsat Desa sebesar Rp 44.700.000,00
- Software Aplikasi Info PKB sebesar Rp 24.250.000,00
- Software Pengesahan SKPD sebesar Rp 95.500.000,00
- Software Aplikasi Samsat Desa Palihan sebesar Rp 22.350.000,00
- Software Aplikasi Validasi STNK dan Cetak SKPD sebesar Rp 47.500.000,00
- Software Scan SKPD sebesar Rp 40.000.000,00
- Software Aplikasi Pedesaan sebesar Rp 44.800.000,00
- Software (Info Pajak dan Status Kendaraan) sebesar Rp 24.750.000,00
- Software Validasi STNK dan Cetak SKPD (Eposti) sebesar Rp 1.146.000.000,00
- Software Web Cam (Layanan Loket Khusus) sebesar Rp 34.750.000,00
- Software Pengesahan SKPD sebesar Rp 95.500.000,00
- Software (Info Pajak dan Status Kendaraan) sebesar Rp 24.210.000,00
- Software sebesar Rp 670.970.000,00
- Software Aplikasi Drive Thru sebesar Rp 44.850.000,00
- Software Aplikasi Samsat Desa Banjararum sebesar Rp 22.900.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Software Bus Samsat Keliling sebesar Rp 306.125.000
- Software Aplikasi Pelayanan DriveThru sebesar Rp 23.000.000,00
- Software Loket Informasi sebesar Rp 99.900.000,00
- Software Aplikasi Kesamsatan Limatahunan sebesar Rp 125.250.000,00
- Software Aplikasi Kesamsatan Sistem Jemput Bola sebesar Rp 21.000.000,00
- Aplikasi SKM sebesar Rp 47.000.000,00
- Software Aplikasi dan Implementasi SIARDI sebesar Rp 89.900.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Software Arsip Digital sebesar Rp 44.950.000,00
- Software sebesar Rp 44.950.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Software Web Camera sebesar Rp 102.500.000,00
- Software Aplikasi Dokumen Scanner SIARDI sebesar Rp 44.950.000,00
- software sebesar Rp 41.850.000,00
- Web base dan Android Base sebesar Rp 78.000.000,00
- Software Arsip Digital sebesar Rp 44.950.000,00
- Software Aplikasi Wecam, Software aplikasi dan Implementasi SIARDI sebesar Rp 67.350.000,00
- Software Scanner sebesar Rp 44.950.000,00
- Software Webcam sebesar Rp 464.897.000,00
- Pengadaan Software Web Camera sebesar Rp 34.000.000,00
- Software Pelayanan Samoling sebesar Rp 23.100.000,00
- Software Aplikasi Samsat Pedesaan Wukirsari sebesar Rp 20.900.000,00
- Software Go Door sebesar Rp 23.100.000,00
- Software Pelayanan MPP sebesar Rp 38.900.000,00
- Aplikasi Pembayaran Pajak GoDoor 2 sebesar Rp 23.100.000,00
- Software Aplikasi Aset Tetap sebesar Rp 159.210.900,00
- Aplikasi RKBMD sebesar Rp 49.855.650,00
- Kajian Highest dan Best Used (HBU) Analisis Kawasan JEC sebesar Rp 149.950.000,00
- Kajian Blok Plantt Bangunan dan Kontribusi Bangunan Guna serta Kawasan JEC sebesar Rp87.650.000,00
- Penilaian Kawasan JEC sebesar Rp 43.505.000,00
- Kajian Penyusunan Dokumen Menguak Kejayaan Bangunan Masa Lalu di Yogyakarta sebesar Rp25.000.000,00
- Kajian Penelitian dan Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sebesar Rp 79.830.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

பொது நிர்வாக அமைச்சு

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.4.4.3. Aset Lain-Lain Rp 142.378.336,76 Rp 116.126.336,76

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan akan dihapus dalam kondisi rusak berat. Saldo Aset Lain-Lain BPKA sebesar Rp 142.378.336,76 merupakan nilai buku yang didapat dari saldo akhir Aset Lain-Lain berupa Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp 2.763.619.222,00 dikurangi dengan saldo akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar (Rp 2.621.240.885,24). Saldo Aset Lain-lain BPKA per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 26.252.000,00 atau 22,61% dari Tahun 2021 sebesar Rp 116.126.336,76.

**3.1.4.4.4. Dana Transfer Treasury Rp 11.724.696.357,00 Rp 0,00
Deposit Facility (TDF)**

Berdasarkan PMK 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, Kementerian Keuangan menempatkan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum untuk Pemerintah Daerah pada Bank Indonesia, kemudian melakukan rekonsiliasi atas saldo dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF tiap-tiap daerah serta dapat memilih untuk menyalurkan remunerasi atas pengelolaan TDF melalui pemindahbukuan ke RKUD atau tetap menyimpan remunerasi pada fasilitas TDF setelah melalui *holding period*. Pada Tahun Anggaran 2022, BPKA DIY mencatat adanya Aset Lainnya berupa Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang masih berada di Bank Indonesia dan belum ditransfer ke RKUD sebesar Rp 11.724.696.357,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

2022 **2021 (audited)**

3.1.6. Kewajiban **Rp 15.253.458.692,22** **Rp 26.516.694.527,16**

Kewajiban BPKA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15.253.458.692,22 merupakan Kewajiban Jangka Pendek berupa Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 7.409.029.724,22; Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 202.338.436,00; serta Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 7.642.090.532,00. Kewajiban BPKA per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp 11.263.235.834,94) atau sebesar (42,48%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 26.516.694.527,17. Rincian kewajiban BPKA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.93
Rincian Kewajiban per Unit Kerja

No.	URAIAN	2022	2021
1	Pendapatan Diterima Dimuka	7.409.029.724,22	1.567.336.917,16
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	202.338.436,00	240.883.904,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil	7.642.090.532,00	24.708.473.706,00
JUMLAH (Rp)		15.253.458.692,22	26.516.694.527,16

3.1.6.1. Pendapatan Diterima Dimuka **Rp 7.409.029.724,22** **Rp 1.567.336.917,17**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2022 belum dikonsumsi/dimanfaatkan oleh pihak tersebut. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut berasal dari BPKA (induk) sebesar Rp 7.261.626.642,04; KPPD Bantul sebesar Rp 24.367.123,29; KPPD Kulon Progo sebesar Rp 83.648.219,18; dan KPPD Sleman sebesar Rp 39.387.739,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.94
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA (Induk)

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	
							Periode	Nilai
1	Tanah dan Bangunan	eks Pabrik Sabut Pengasih Kulon Progo	PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No. 66 Yk	11/PERJ/GUB/XI/2022 11/7/2022	01/09/2022 s/d 31/08/2023	116.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-8-2023	77.227.397,26
JUMLAH								77.227.397,26
2	Bangunan	eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD DIY	8/PERJ/GUB/VIII/2022 09/08/2022	1/7/2022 s/d 30/6/2027	990.000.000,00	1-1-2023 s/d 30-6-2023	98.186.301,37
					1/7/2022 s/d 30/6/2023	198.000.000,00		198.000.000,00
					1/7/2023 s/d 30/6/2024	198.000.000,00		198.000.000,00
					1/7/2024 s/d 30/6/2025	198.000.000,00		198.000.000,00
					1/7/2025 s/d 30/6/2026	198.000.000,00		198.000.000,00
					1/7/2026 s/d 30/6/2027	198.000.000,00		198.000.000,00
JUMLAH								890.186.301,37



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආයතන වාණිජ මහලක සේවා සහ සේවා සහන සේවාව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	
							Periode	Nilai
3	Tanah	Dlaban, Sentolo, Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	6/PERJ/GUB/IV/2022 21/04/2020	1/4/2022 s/d 31/3/2024 1/4/2022 s/d 31/3/2023 1/4/2023 s/d 31/3/2024	233.400.000,00 116.700.000,00 116.700.000,00	1-1-2023 s/d 31-3-2023	28.775.342,47 116.700.000,00
							JUMLAH	145.475.342,47
4	Tanah dan Bangunan	Eks Diklat Perindustrian, Malangan Ring Road Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	357/KEP/2022 09/12/2022	23/10/2022 s/d 22/10/2023	67.704.000,00	1-1-2023 s/d 22-10-2023	54.719.671,24
							JUMLAH	54.719.671,23
5	Tanah dan Bangunan	Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji 45 Yk	Suprihanto, B.Sc	10/PERJ/GUB/IX/2022 15/09/2022	01/04/2022 s/d 31/03/2023	191.250.000,00	1-1-2023 s/d 31-3-2023	47.157.534,25
							JUMLAH	47.157.534,25
6	Tanah	Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32 Yk	BUKP Gondokusuman	229/KEP/2019 27/09/2019 53/PERJ/SEKDA/XI/2022 07/11/2022	9/1/2019 s/d 31/8/2022 Keringanan sewa berupa penambahan jangka waktu 9/1/2022 s/d 2/28/2023	60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00	1-1-2023 s/d 28-2-2023	1.852.804,34
							JUMLAH	1.852.804,34
7	Tanah dan Bangunan	Jalan Wisata Babarsari, Sleman	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman	1/PERJ/SEKDA/I/2022 07/01/2022	20/11/2021 s/d 19/11/2026 20/11/2021 s/d 19/11/2022 20/11/2022 s/d 19/11/2023 20/11/2023 s/d 19/11/2024 20/11/2024 s/d 19/11/2025 20/11/2025 s/d 19/11/2026	45.200.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00	1-1-2023 s/d 19-11-2023	7.999.780,82 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00
							JUMLAH	35.119.780,82
8	Tanah	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	14/PERJ/SEKDA/III/2022 21/03/2022	28/3/2022 s/d 27/3/2023	16.000.000,00	1-1-2023 s/d 27-3-2023	3.769.863,01
							JUMLAH	3.769.863,01
9	Tanah	D.I. Panjaitan No. 66 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yk	dr. Soedarman	11/PERJ/GUB/IX/2018 17/09/2018	3/2/9018 s/d 2/9/2023 3/2/9018 s/d 2/9/2019 3/2/9019 s/d 2/9/2020 3/2/9020 s/d 2/9/2021 3/2/9021 s/d 2/9/2022 3/2/9022 s/d 2/9/2023	175.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00	1-1-2023 s/d 2-9-2023	23.493.150,68
							JUMLAH	23.493.150,68
10	Tanah	Jl. Perwakilan Wates	Drs. Djuwardi KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo	18/PERJ/SEKDA/VI/2021 21/06/2021	21/20/221 s/d 20/2/2023 21/20/221 s/d 20/2/2022 21/20/222 s/d 20/2/2023	12.400.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00	1-1-2023 s/d 20-2-2023	866.301,37
							JUMLAH	866.301,37
11	Tanah	Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Tirto Manunggal	10/PERJ/SEKDA/III/2020 19/03/2020	1/8/2019 s/d 31/7/2024 1/8/2019 s/d 31/7/2020 1/8/2020 s/d 31/7/2021 1/8/2021 s/d 31/7/2022 1/8/2022 s/d 31/7/2023 1/8/2023 s/d 31/7/2024	20.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-7-2023	2.323.287,67 4.000.000,00
							JUMLAH	6.323.287,67
12	Tanah	Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Pemerintah Kalurahan Widodomartani	27/PERJ/SEKDA/X/2021 11/10/2021	1/9/2021 s/d 31/8/2026 1/9/2021 s/d 31/8/2022 1/9/2022 s/d 31/8/2023 1/9/2023 s/d 31/8/2024 1/9/2024 s/d 31/8/2025 1/9/2025 s/d 31/8/2026	24.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00	1-1-2023 s/d 31-8-2023	3.195.616,44 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00
							JUMLAH	17.595.616,44



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦏꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	
							Periode	Nilai
13	Tanah	Jalan Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	PT. Daya Armada Nusantara	5/PERJ/GUB/IV/2022 01/04/2022	25/3/2022 s/d 24/3/2027 25/3/2022 s/d 24/3/2023 25/3/2023 s/d 24/3/2024 25/3/2024 s/d 24/3/2025 25/3/2025 s/d 24/3/2026 25/3/2026 s/d 24/3/2027	143.500.000,00 28.700.000,00 28.700.000,00 28.700.000,00 28.700.000,00 28.700.000,00	1-1-2023 s/d 24-3-2022	6.526.301,37 28.700.000,00 28.700.000,00 28.700.000,00 28.700.000,00
							JUMLAH	121.326.301,37
12	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Tien Setiantoro	309/KEP/2022 26/10/2022	1/9/2022 s/d 31/8/2023	10.500.000,00	1-1-2023 s/d 31-8-2023	6.990.410,96
							JUMLAH	6.990.410,96
13	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Aris Purnomo	309/KEP/2022 26/10/2022	1/9/2022 s/d 31/8/2025 1/9/2022 s/d 31/8/2023 1/9/2023 s/d 31/8/2024 1/9/2024 s/d 31/8/2025	6.300.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00	1-1-2023 s/d 31-8-2023	1.398.082,19 2.100.000,00 2.100.000,00
							JUMLAH	5.598.082,19
14	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Sumartiningsih	309/KEP/2022 26/10/2022	1/9/2022 s/d 31/8/2025 1/9/2022 s/d 31/8/2023 1/9/2023 s/d 31/8/2024 1/9/2024 s/d 31/8/2025	12.600.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00	1-1-2023 s/d 31-8-2023	2.796.164,38 4.200.000,00 4.200.000,00
							JUMLAH	11.196.164,38
15	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Roos Ani	309/KEP/2022 26/10/2022	1/9/2022 s/d 31/8/2025 1/9/2022 s/d 31/8/2023 1/9/2023 s/d 31/8/2024 1/9/2024 s/d 31/8/2025	8.190.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00	1-1-2023 s/d 31-8-2023	1.817.506,85 2.730.000,00 2.730.000,00
							JUMLAH	7.277.506,85
16	Tanah	Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yk	Suka Astuti	309/KEP/2022 26/10/2022	1/9/2022 s/d 31/8/2023	3.150.000,00	1-1-2023 s/d 31-8-2023	2.097.123,29
							JUMLAH	2.097.123,29
17	Tanah dan Bangunan	Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	374/KEP/2022 19/12/2022	1/12/2022 s/d 30/11/2023	11.500.000,00	1-1-2023 s/d 30-11-2023	10.523.287,67
							JUMLAH	10.523.287,67
18	Tanah dan Bangunan	Karangjati, Mlati, Sleman	PT. Avo Innovation Technology	19/PERJ/SEKDA/VI/2021 24/062021	1/5/2021 s/d 30/4/2023 1/5/2021 s/d 30/4/2022 1/5/2022 s/d 30/4/2023	29.600.000,00	1-1-2023 s/d 30/04/2023	4.865.753,42
							JUMLAH	4.865.753,42
19	Tanah dan Bangunan	Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Bambang Priambodo	12/PERJ/SEKDA/II/2022 15/02/2022	01/1/2022 s/d 31/12/2023 01/1/2022 s/d 31/12/2022 01/1/2023 s/d 31/12/2023	72.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-12-2023	36.000.000,00
							JUMLAH	36.000.000,00
20	Tanah	Tambak Udang di Gadingsari, Sanden	YB Pratomo	10/PERJ/SEKDA/I/2022 31/01/2022	1/2/2022 s/d 31/1/2027 1/2/2022 s/d 31/1/2023 1/2/2023 s/d 31/1/2024 1/2/2024 s/d 31/1/2025 1/2/2025 s/d 31/1/2026 1/2/2026 s/d 31/1/2027	115.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-1-2023	1.953.424,66 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
							JUMLAH	93.953.424,66
21	Tanah dan Bangunan	Komplek Colombo No. 56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala Darma Saputra	13/PERJ/SEKDA/II/2022 24/02/2022	31/01/2022 s/d 30/01/2023	19.500.000,00	1-1-2023 s/d 30-01-2023	1.602.739,73
							JUMLAH	1.602.739,73
22	Tanah	Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	11/PERJ/SEKDA/IV/2021 16/04/2020	1/1/2021 s/d 31/12/2023 1/1/2021 s/d 31/12/2021 1/1/2022 s/d 31/12/2022 1/1/2023 s/d 31/12/2023	4.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	1-1-2023 s/d 31-12-2023	1.500.000,00
							JUMLAH	1.500.000,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	
							Periode	Nilai
23	Tanah	Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Widodo Mulyo	336/KEP/2022 21/11/2022	1/10/2022 s/d 30/9/2025 1/10/2022 s/d 30/9/2023 1/10/2023 s/d 30/9/2024 1/10/2024 s/d 30/9/2025	4.800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00	1-1-2023 s/d 30-9-2023	1.196.712,33 1.600.000,00 1.600.000,00
							JUMLAH	4.396.712,33
24	Tanah dan Bangunan	Jalan D.I. Panjaitan No. 70, Mantrijeron, Suryodiningratan, Yk	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	7/PERJ/GUB/VIII/2021 13/08/2021	1/4/2021 s/d 31/3/2026 1/4/2021 s/d 31/3/2022 1/4/2022 s/d 31/3/2023 1/4/2023 s/d 31/3/2024 1/4/2024 s/d 31/3/2025 1/4/2025 s/d 31/3/2026	126.000.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00	1-1-2023 s/d 31-3-2023	6.213.698,63 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00
							JUMLAH	81.813.698,63
25	Tanah dan Bangunan	Komplek Griya Permata Hijau	CV. Plainthing Group	22/PERJ/SEKDA/VII/2021 21/07/2021	8/4/2021 s/d 7/4/2023 8/4/2021 s/d 7/4/2022 8/4/2022 s/d 7/4/2023	43.600.000,00 21.800.000,00 21.800.000,00	1-1-2023 s/d 7-4-2023	5.793.424,66
							JUMLAH	5.793.424,66
26	Tanah dan Bangunan	Jalan Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	20/PERJ/SEKDA/VI/2021 28/06/2021	1/6/2021 s/d 31/5/2024 1/6/2021 s/d 31/5/2022 1/6/2022 s/d 31/5/2023 1/6/2023 s/d 31/5/2024	12.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-5-2023	1.654.794,52 4.000.000,00
							JUMLAH	5.654.794,52
27	Tanah dan Bangunan	Jalan Kusumanegara Nomor 168E Yogyakarta	LP2Desaku	156/KEP/2021 11/06/2021	1/2/2021 s/d 31/1/2023 1/2/2021 s/d 31/1/2022 1/2/2022 s/d 31/1/2023	16.500.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00	1-1-2023 s/d 31-1-2023	700.684,93
							JUMLAH	700.684,93
28	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Abung Hidayat	343/KEP/2022 30/11/2022	1/10/2022 s/d 30/9/2027 1/10/2022 s/d 30/9/2023 1/10/2023 s/d 30/9/2024 1/10/2024 s/d 30/9/2025 1/10/2025 s/d 30/9/2026 1/10/2026 s/d 30/9/2027	39.500.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00	1-1-2023 s/d 30/9/2023	5.908.767,12 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00
							JUMLAH	37.508.767,12
29	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Uep Sumiarsih	343/KEP/2022 30/11/2022	1/10/2022 s/d 30/9/2023	3.550.000,00	1-1-2023 s/d 30-9-2023	2.655.205,48
							JUMLAH	2.655.205,48
30	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Juu	343/KEP/2022 30/11/2022	1/10/2022 s/d 30/9/2023	5.225.000,00	1-1-2023 s/d 30-9-2023	3.908.013,70
							JUMLAH	3.908.013,70
31	Tanah	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Zuljasrifon	343/KEP/2022 30/11/2022	1/10/2022 s/d 30/9/2026 1/10/2022 s/d 30/9/2023 1/10/2023 s/d 30/9/2024 1/10/2024 s/d 30/9/2025 1/10/2025 s/d 30/9/2026	22.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00	1-1-2023 s/d 30-9-2023	3.365.753,42 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
							JUMLAH	16.865.753,42
32	Tanah dan Bangunan	Eks TKD Wates	Beberapa Penyewa	Masing-masing perjanjian	05/07/2021 s/d 04/07/2022	240.853.816,00	1-1-2023 s/d 04-07-2023	122.076.591,67
							JUMLAH	122.076.591,67
33	Tanah dan Bangunan	Jalan Malioboro Nomor 52 - 58 Yogyakarta	PT. Setia Mataram Tritunggal	9/PERJ/GUB/IX/2022 13/09/2022	13/9/2022 s/d 12/9/2023	7.650.000.000,00	1-1-2023 s/d 12-9-2023	5.344.520.547,95
							JUMLAH	5.344.520.547,95



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආකෘතිමය වාර්තා සහ ප්‍රකාශන

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Aset	Lokasi	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	
							Periode	Nilai
34	Tanah dan Bangunan	Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Sleman	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	19/PERJ/SEKDA/IV/2022 21/04/2022	1/3/2022 s/d 28/2/2027 1/3/2022 s/d 28/2/2023 1/3/2023 s/d 28/2/2024 1/3/2024 s/d 28/2/2025 1/3/2025 s/d 28/2/2026 1/3/2026 s/d 28/2/2027	31.725.000,00 6.345.000,00 6.345.000,00 6.345.000,00 6.345.000,00 6.345.000,00	1-1-2023 s/d 28-2-2023	1.025.630,14 6.345.000,00 6.345.000,00 6.345.000,00 6.345.000,00
							JUMLAH	26.405.630,14
25	Rumah Dinas	Rumah Dinas di Jl. Bima 25B Jurugentong Banguntapan Bantul	Ajie Mardana ST	012/04320/PBD 27/08/2021	1/8/2022 s/d 31/1/2023	780.000,00	1-1-2023 s/d 31-1-2023	66.246,58
							JUMLAH	66.246,58
26	Rumah Dinas	Rumah Dinas di Jalan Warung Boto 917	Umi Hartini	012/05905/PBD 29/09/2021	1/10/2022 s/d 31/3/2023	816.000,00	1-1-2022 s/d 31-3-2022	201.205,48
							JUMLAH	201.205,48
27	Rumah Dinas	Rumah Dinas di Jalan DI Panjaitan No 74	Ny. Djaenab Murniati	012/08025/PBD 01/11/2021	1/12/2022 s/d 31/3/2023	2.513.600,00	1-1-2023 s/d 31-3-2023	619.791,78
							JUMLAH	619.791,78
28	Rumah Dinas	Rumah Dinas di Jalan Gedongan Baru I No.A2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Arum Iswandari	012/07094/PBD 29/09/2021	1/11/2022 s/d 31/1/2023	630.000,00	1-1-2023 s/d 31-1-2023	53.506,85
							JUMLAH	53.506,85
29	Rumah Dinas	Rumah Dinas di Randubelang No.40 Bangunharjo, Sewon, Bantul	Sigit Arianta Wibowo	012/05523/PBD 16/08/2021	1/9/2021 s/d 31/8/2023 1/9/2021 s/d 31/8/2022 1/9/2022 s/d 31/8/2023	2.858.400,00 1.429.200,00 1.429.200,00	1-1-2023 s/d 31-8-2023	951.494,79
							JUMLAH	951.494,79
30	Rumah Dinas	Rumah Dinas di Jalan Sriti 20 B Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Dra. Sulistyarningsih	012/00213/PBD 16/01/2022	1/3/2022 s/d 28/2/2023	3.396.000,00	1-1-2022 s/d 28-2-2022	548.942,47
							JUMLAH	548.942,47
31	Rumah Dinas	Rumah Dinas di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Gutik Lestarna SPT	012/07094/PBD 27/08/2021	1/12/2022 s/d 31/1/2023	499.000,00	1-1-2023 s/d 31-1-2023	42.380,82
							JUMLAH	42.380,82
32	Rumah Dinas	Rumah Dinas di jl Gedongan Baru I 742 B4 Banguntapan Bantul	Hasan Khoiri AMD	012/06174/PBD 08/01/2022	1/12/2022 s/d 28/2/2023	775.800,00	1-1-2023 s/d 28-2-2023	125.403,29
							JUMLAH	125.403,29
							PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	7.261.626.642,04



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.95

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka KPPD Bantul

No	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	
					Periode	Nilai
1	Bank BNI Cabang Yogyakarta	119/07702	16/10/2020 s/d 15/10/2023	9.000.000,00	1-1-2023 s/d 15-10-2023	2.367.123,29
			16/10/2020 s/d 15/10/2021	3.000.000,00		
			16/10/2021 s/d 15/10/2022	3.000.000,00		
			16/10/2022 s/d 15/10/2023	3.000.000,00		
					JUMLAH	2.367.123,29
2	Pimpinan BRI Cabang Bantul	900/08370	01/01/2022 s/d 31/12/2024	12.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-12-2023	4.000.000,00 4.000.000,00
			01/01/2022 s/d 31/12/2022	4.000.000,00		
			01/01/2023 s/d 31/12/2023	4.000.000,00		
			01/01/2024 s/d 31/12/2024	4.000.000,00		
					JUMLAH	8.000.000,00
3	Pimpinan PT Bank BPD DIY Cabang Bantul	900/08376	01/01/2022 s/d 31/12/2026	17.500.000,00	1-1-2023 s/d 31-12-2023	3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
			01/01/2022 s/d 31/12/2022	3.500.000,00		
			01/01/2023 s/d 31/12/2023	3.500.000,00		
			01/01/2024 s/d 31/12/2024	3.500.000,00		
			01/01/2025 s/d 31/12/2025	3.500.000,00		
						14.000.000,00
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA						24.367.123,29

Tabel III.96

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka KPPD Sleman

No	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	
					Periode	Nilai
1	PT. BANK BPD DIY Cabang Sleman (Sewa Kantor Kas BPD)	19/00357/I/2019	01/01/2019 s/d 31/12/2023	95.000.000,00	1-1-2023 s/d 15-10-2023	19.000.000,00
			01/01/2019 s/d 31/12/2019	19.000.000,00		
			01/01/2020 s/d 31/12/2020	19.000.000,00		
			01/01/2021 s/d 31/12/2021	19.000.000,00		
			01/01/2022 s/d 31/12/2022	19.000.000,00		
					JUMLAH	19.000.000,00
2	PT. BANK BPD DIY Cabang Sleman (ATM BPD)	197/01509/IV/2019	01/04/2019 s/d 31/03/2024	81.775.000,00	1-1-2023 s/d 31-3-2023	4.032.739,73 16.355.000,00
			01/04/2019 s/d 31/03/2020	16.355.000,00		
			01/04/2020 s/d 31/03/2021	16.355.000,00		
			01/04/2021 s/d 31/03/2022	16.355.000,00		
			01/04/2022 s/d 31/03/2023	16.355.000,00		
					JUMLAH	20.387.739,73
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA						39.387.739,73



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

பொது நிர்வாகப் பின்புல நிர்வாக அமைப்பு

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.97

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka KPPD Kulon Progo

No	Pihak Penyewa	Nomor Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	
					Periode	Nilai
1	PT BRI (PERSERO) Tbk Cabang Wates (ATM)	934/5367	01/08/2022 s/d 31/07/2023	3.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-7-2023	1.742.465,75
					JUMLAH	1.742.465,75
2	PT BNI (PERSERO) Cabang UGM (ATM)	934/5342	01/08/2021 s/d 31/07/2024	9.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-7-2023	1.742.465,75
			01/08/2021 s/d 31/07/2022	3.000.000,00		
			01/08/2022 s/d 31/07/2023	3.000.000,00		
			01/08/2023 s/d 31/07/2024	3.000.000,00		3.000.000,00
					JUMLAH	4.742.465,75
3	Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	934/5364	01/08/2022 s/d 31/07/2023	4.650.000,00	1-1-2023 s/d 31-7-2023	2.700.821,92
					JUMLAH	2.700.821,92
4	CV Pandean Baru Motor (Saptono Budi Raharjo)	934/5363	01/08/2022 s/d 31/07/2023	4.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-7-2023	2.323.287,67
					JUMLAH	2.323.287,67
5	Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	934/5366	01/08/2022 s/d 31/07/2023	16.250.000,00	1-1-2023 s/d 31-7-2023	9.438.356,16
					JUMLAH	9.438.356,16
6	Painem (Kantin)	934/5369	01/08/2022 s/d 31/07/2023	4.650.000,00	1-1-2023 s/d 31-7-2023	2.700.821,92
					JUMLAH	2.700.821,92
7	PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	934/6558	01/01/2022 s/d 31/12/2026	60.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-12-2023	12.000.000,00
			01/01/2022 s/d 31/12/2022	12.000.000,00		12.000.000,00
			01/01/2023 s/d 31/12/2023	12.000.000,00		12.000.000,00
			01/01/2024 s/d 31/12/2024	12.000.000,00		12.000.000,00
			01/01/2025 s/d 31/12/2025	12.000.000,00		12.000.000,00
			01/01/2026 s/d 31/12/2026	12.000.000,00		12.000.000,00
					JUMLAH	48.000.000,00
8	PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD)	934/6558	01/01/2022 s/d 31/12/2026	15.000.000,00	1-1-2023 s/d 31-12-2023	3.000.000,00
			01/01/2022 s/d 31/12/2022	3.000.000,00		3.000.000,00
			01/01/2023 s/d 31/12/2023	3.000.000,00		3.000.000,00
			01/01/2024 s/d 31/12/2024	3.000.000,00		3.000.000,00
			01/01/2025 s/d 31/12/2025	3.000.000,00		3.000.000,00
			01/01/2026 s/d 31/12/2026	3.000.000,00		3.000.000,00
					JUMLAH	12.000.000,00
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA						83.648.219,18



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

2.1.06. Utang Belanja Rp 7.844.428.968,00 Rp 24.949.357.610,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.844.428.968,00 merupakan beban BPKA atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2022 tetapi belum dibayarkan sebesar Rp 202.338.436,00 serta utang transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 7.642.090.532,00. Saldo Utang Belanja BPKA per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp 17.104.928.642,00) atau (68,56%) dibandingkan dengan Utang Belanja BPKA Tahun 2021 sebesar Rp 24.949.357.610,00.

2.1.06.02. Utang Belanja Barang dan Jasa Rp 202.338.436,00 Rp 240.883.904,00

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp 202.338.436,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 38.545.468,00) atau (16,00%) dibandingkan dengan Utang Belanja Barang dan Jasa BPKA Tahun 2021 sebesar Rp 240.883.904,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.98
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per Unit Kerja

No.	UTANG BELANJA	BPKA (induk)	KPPD Kota	KPPD Bantul	KPPD GK	KPPD KP	KPPD SLEMAN	JUMLAH (Rp)
1	Tagihan Telepon	952.038,00	230.212,00	133.310,00	97.296,00	55.894,00	50.878.354,00	1.609.584,00
2	Tagihan Air	122.700,00	-	60.200,00	1.098.270,00	3.009.000,00	140.834,00	4.483.670,00
3	Tagihan Listrik	13.344.452,00	19.599.095,00	49.746.402,00	14.877.924,00	28.354.111,00	193.500,00	176.800.338,00
5	Kawat/Faksimili/Internet/TV	-	699.750,00	7.665.900,00	10.790.444,00	-	-	19.156.094,00
6	Pengolahan Sampah	-	-	-	-	-	288.750	288.750,00
JUMLAH (Rp)		14.419.190,00	20.529.057,00	57.605.812,00	26.863.934,00	31.419.005,00	51.501.438,00	202.338.436,00

2.1.06.03. Utang Belanja Bagi Hasil Rp 7.642.090.532,00 Rp 24.708.473.706,00

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.642.090.532,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Utang Belanja Bagi Hasil memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel III.99
Rincian Utang Belanja Bagi Hasil

No.	URAIAN	2022
1	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Bantul	1.745.092.380,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Gunungkidul	833.114.942,00
3	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Kulon Progo	918.048.470,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil Kab. Sleman	2.731.917.970,00
5	Utang Belanja Bagi Hasil Kota Yogyakarta	1.413.916.770,00
JUMLAH (Rp)		7.642.090.532,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකෘතිමය පාලන සහ සේවා කොමිෂන් සභාව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2022	2021 (audited)
3.1.7. <u>Ekuitas</u>	<u>Rp 3.387.355.288.460,40</u>	<u>Rp 3.156.556.769.719,74</u>

Saldo Ekuitas BPKA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.387.355.288.460,00 merupakan kekayaan bersih BPKA yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban BPKA pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas BPKA per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 230.798.518.740,66 atau 7,31% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 3.156.556.769.719,74.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas Awal sebesar Rp 3.156.556.769.719,74; ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp 4.159.867.712.583,22; dikurang eliminasi RK PPKD sebesar (Rp 3.953.446.386.847,85); dan ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp 24.377.193.005,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.100
Mutasi Ekuitas

No	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas Awal	3.156.556.769.719,74
2	Surplus/Defisit – LO	4.159.867.712.583,22
3	RK PPKD	(3.953.446.386.847,85)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	24.377.193.005,29
	JUMLAH (Rp)	3.387.355.288.460,40



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

	2022	2021 (audited)
3.1.8. <u>Pendapatan Daerah-LO</u>	<u>Rp 5.577.379.989.123,38</u>	<u>Rp 6.497.725.135.915,01</u>

Pendapatan Daerah-LO BPKA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 5.577.379.989.123,38 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp 2.250.141.729.947,66; Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp 3.269.446.186.331,00; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp 57.792.072.844,72 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.8.1. <u>Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO</u>	<u>Rp 2.250.141.729.947,66</u>	<u>Rp 1.875.279.627.463,44</u>
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO BPKA Tahun 2022 sebesar Rp 2.250.141.729.947,66 meliputi Pajak Daerah-LO sebesar Rp 1.951.260.431.032,85; Retribusi Daerah-LO sebesar Rp 859.677.831,97; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp 199.891.066.543,92; dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp 98.130.554.538,92 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.8.1.1. <u>Pajak Daerah-LO</u>	<u>Rp 1.951.260.431.032,85</u>	<u>Rp 1.688.402.302.123,00</u>
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Pajak Daerah BPKA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.951.260.431.032,85. Pajak Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp 262.858.128.909,85 atau 15,57% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 1.688.402.302.123,00. Pajak Daerah-LO BPKA terdiri dari pendapatan pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dikurangi dengan piutang pajak yang sudah dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.101
Rincian Pajak Daerah-LO

URAIAN	2022	2021
PAJAK DAERAH-LO		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	953.419.792.200,00	874.699.341.950,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	404.963.726.500,00	362.968.212.400,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	302.161.948.065,85	232.244.843.244,00
Pajak Air Permukaan-LO	1.123.483.976,00	1.301.742.775,00
Pajak Rokok-LO	289.591.480.291,00	217.188.161.754,00
JUMLAH (Rp)	1.951.260.431.032,85	1.688.402.302.123,00

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO sebesar Rp 953.419.792.200,00 merupakan Pendapatan PKB sebesar Rp 953.422.127.400,00 dikurangi dengan pembayaran piutang PKB sebesar (Rp 2.335.200,00). Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO sebesar Rp 404.963.726.500,00 merupakan Pendapatan BBNKB sebesar Rp 404.968.406.500,00 dikurangi dengan pembayaran piutang BBNKB sebesar (Rp 4.680.000,00).



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂක ව්‍යවස්ථාපිත ආරක්ෂක සේවකාර්මයක් සහිතව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.8.1.2. Retribusi Daerah-LO Rp 859.677.831,97 Rp 972.291.963,55

Pendapatan Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 859.677.831,97. Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp 112.614.131,58) atau (11,58%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 972.291.963,55. Retribusi Daerah-LO BPKA pada Tahun 2022 terdiri dari Retribusi Jasa Usaha yang seluruh pendapatannya bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diterima secara kas oleh Bendahara Penerimaan pada akhir Tahun 2022 dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp 870.571.800,00 ditambah dengan pembayaran Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 sebesar Rp 322.132.417,61 dikurangi dengan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar (Rp 333.026.385,64) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.102
Rincian Retribusi Daerah-LO

URAIAN	2022	2021
RETRIBUSI DAERAH-LO		
RETRIBUSI JASA USAHA-LO		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO		
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	401.137.383,84	544.411.220,33
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	145.629.600,18	133.551.738,08
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	312.910.847,95	294.329.005,14
JUMLAH (Rp)	859.677.831,97	972.291.963,55

3.1.8.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Rp 199.891.066.543,92 Rp 153.233.086.264,59

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO BPKA Tahun 2022 adalah sebesar Rp 199.891.066.543,92. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp 46.657.980.279,33 atau 30,45% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 153.233.086.264,59. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO BPKA Tahun 2022 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak BPKA DIY sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 199.711.987.100,91 (Metode Ekuitas) yang menambah Investasi Permanen yang diterima secara kas sebesar Rp 179.079.443,00 (Metode Perolehan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.103
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2022	2021
1	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	10.246.697.429,54	13.598.386.504,01
2	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	196.958.195.025,96	137.367.021.955,23
3	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	1.878.109.987,17	3.627.808.155,54
4	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY (Metode Ekuitas)	(10.797.733.578,89)	(10.783.559.581,16)
5	PT. Asuransi Bangun Askrida (Metode Harga Perolehan)	179.079.443,00	110.733.653,00
6	Badan Usaha Kredit Pedesaan (Metode Ekuitas)	1.426.718.237,13	9.312.695.577,96
	Jumlah (Rp)	199.891.066.543,92	153.233.086.264,59



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ꦧꦏꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦏꦺꦴꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah sebagai berikut:

1. PT. Taru Martani

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp 10.247.107.313,84 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp 10.246.697.429,54 ($99,996\% \times \text{Rp } 10.247.107.313,84$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp 10.246.697.429,54.

2. PT. BPD DIY

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 51,00%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 PT.BPD DIY mencatat Ekuitas pada Neraca sebesar Rp 386.192.539.266,59 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51,00% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp 196.958.195.025,96 ($51,00\% \times \text{Rp } 386.192.539.266,90$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp 196.958.195.025,96.

3. PT. Anindya Mitra Internasional

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp 1.879.030.712,22 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp 1.878.109.987,17 ($99,951\% \times \text{Rp } 1.879.030.712,22$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp 1.878.109.987,17.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦁꦏꦺꦸꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦢꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦠꦺꦁꦏꦺꦸꦁꦤ꧀

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

4. Perumda Air Bersih Tirtatama DIY

Kepemilikan saham Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 100,00%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 Perumda Air Bersih Tirtatama mencatat kerugian sebesar (Rp 10.797.733.578,89) dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 100,00% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas kerugian sebesar (Rp 10.797.733.578,89) (100,00% x Rp 10.797.733.578,89). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan mengurangi nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar (Rp 10.797.733.578,89).

5. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)

Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.190.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,223%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2022, Pemda DIY telah menerima Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) sebesar Rp 179.079.443,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) Tahun 2022.

6. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Kepemilikan saham Pemda DIY pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 83,140%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2022 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) mencatat laba sebesar Rp 1.716.043.104,56 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,140% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp 1.426.718.237,13 (83,140% x Rp 1.716.043.104,56). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp 1.426.718.237,13.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.8.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO Rp 98.130.554.538,92 Rp 32.671.947.112,30

Lain-Lain PAD yang Sah-LO BPKA Tahun 2022 adalah sebesar Rp 98.130.554.538,92. Lain-Lain PAD yang Sah BPKA Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 65.458.607.426,62 atau 200,35% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 32.671.947.112,30. Lain-Lain PAD yang Sah-LO BPKA Tahun 2022 terdiri dari Lain-lain PAD yang Sah-LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.104
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO**

URAIAN	2022	2021
LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	326.929.865,06	122.025.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	7.351.215.160,97	4.273.755.789,60
Jasa Giro-LO	10.360.056.324,00	20.120.993.703,96
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	-	590.688.235,01
Pendapatan Bunga-LO	14.752.843.587,42	3.214.611.877,48
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	8.000.000,00	3.500.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	310.727.434,00	760.577.134,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	64.065.164.400,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	32.514.226,00	29.973.950,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	61.721.413,00	103.297.987,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	861.803.128,47	3.321.753.943,25
TOTAL (Rp)	98.130.554.538,92	32.541.177.620,30

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp 326.929.865,06 merupakan:
 - Hasil penjualan Peralatan dan Mesin-LO sebesar Rp 220.335.430,88
 - Hasil penjualan Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp 33.794.434,18
 - Hasil penjualan Aset Lainnya-LO sebesar Rp 72.800.000,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp 7.351.215.160,97 merupakan:
 - Hasil Sewa BMD-LO sebesar Rp 6.518.215.160,97 yang didapat dari Hasil Sewa BMD sebesar Rp 12.349.014.000,00 ditambah dengan pembayaran Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebesar Rp 1.245.204.499,56 dikurangi dengan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp 7.076.003.338,59)
 - Hasil dari Bangun Guna Serah-LO sebesar Rp 833.000.000,00
- Jasa Giro-LO sebesar Rp 10.360.056.324,00 merupakan:
 - Jasa Giro pada Kas Daerah-LO sebesar Rp 9.997.862.819,00
 - Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO sebesar Rp 351.737.999,00
 - Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO sebesar Rp 10.455.506,00
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO sebesar Rp 0,00 didapat dari pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp 7.750.000,00 dikurangi dengan pembayaran piutang bunga dan denda dana bergulir sebesar (Rp 7.750.000,00)
- Pendapatan Bunga-LO sebesar Rp 14.752.843.587,42 merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah DIY pada PT Bank BPD DIY sebesar Rp 14.749.999.992,00 ditambah dengan koreksi BPK untuk mengakui remunerasi dari Kementerian Keuangan yang ditransfer secara non tunai namun belum ditransfer ke RKUD sebesar Rp 2.843.595,42



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂක ව්‍යවස්ථාපන කමිටුව පාලන කොමිෂන් සභාව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO sebesar Rp 8.000.000,00 didapat dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp 9.250.000,00 dikurangi pembayaran ganti kerugian daerah dari PD. Pertambangan Mangan DIY sebesar (Rp 1.250.000,00)
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp 310.727.434,00 merupakan pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di berbagai OPD
- Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO sebesar Rp 64.064.743.400,00 terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO sebesar Rp 62.709.078.500,00 dan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO sebesar Rp 1.355.664.900,00.
 - Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO sebesar Rp 62.709.078.500,00 didapat dari Pendapatan Denda PKB sebesar Rp 62.709.477.000,00 dikurangi dengan pembayaran piutang denda PKB sebesar (Rp 398.500,00).
 - Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO sebesar Rp 1.355.664.900,00 didapat dari Pendapatan Denda BBNKB sebesar Rp 1.358.582.100,00 dikurangi dengan pembayaran piutang denda BBNKB sebesar (Rp 2.917.200,00)
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sebesar Rp 32.514.226,00 merupakan pembayaran denda dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO sebesar Rp 61.721.413,00 merupakan pendapatan dari untuk jaminan pelaksanaan rehabilitasi bangunan
- Pendapatan dari Pengembalian-LO sebesar Rp 861.803.128,47 merupakan:
 - Pengembalian kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO sebesar Rp 825.595.353,47
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-LO sebesar Rp 36.207.775,00

3.1.8.2. Pendapatan Transfer-LO Rp 3.269.446.186.331,00 Rp 3.794.855.660.531,00

Pendapatan Transfer-LO BPKA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.269.446.186.331,00 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak PPKD DIY yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2022 dan tidak perlu dibayar kembali oleh PPKD DIY kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.105
Rincian Pendapatan Transfer-LO**

URAIAN	2022	2021
PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.269.446.186.331,00	3.794.855.660.531,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO	3.268.574.892.841,00	3.794.050.615.221,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	1.944.975.239.358,00	2.436.884.453.142,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	107.696.079.891,00	132.615.520.738,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.230.648.396.542,00	1.224.852.487.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	137.529.856.469,00	135.901.240.001,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	469.100.906.456,00	943.515.205.403,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	1.323.599.653.483,00	1.357.166.162.080,00
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	64.312.676.000,00	77.593.507.000,00
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO	1.259.286.977.483,00	1.279.572.655.079,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	871.293.490,00	805.045.310,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota-LO	871.293.490,00	805.045.310,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.8.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Rp 57.792.072.844,72 Rp 827.589.847.920,57

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 57.792.072.844,72 merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sudah menjadi hak PPKD DIY yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2022 dan tidak perlu dibayar kembali oleh PPKD DIY kepada pihak lain berupa pengakuan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.106
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

URAIAN	2022	2021
PENDAPATAN HIBAH-LO	55.234.623.086,00	827.409.903.990,80
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	47.022.159.936,00	775.536.362.299,71
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	716.200.000,00	44.731.911.691,09
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	7.484.595.000,00	-
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	-	7.141.630.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	11.668.150,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-LO	2.557.449.758,72	179.943.929,77
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO	-	148.103.131,77
Pendapatan Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	2.557.449.758,72	31.840.798,00
Jumlah (Rp)	57.780.404.694,72	827.589.847.920,57

3.1.8.4. Surplus Non Operasional-LO Rp 619.920.633,94 Rp 662.451.787,00

Surplus Non Operasional-LO BPKA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 619.920.633,94 merupakan surplus dari penjualan Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada SMA, SMK, dan Balai Dkmen di Lingkungan Pemda DIY dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 466.666.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 220.335.430,88 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 246.330.569,12
- Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada BPRSW Dinas Sosial DIY dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 35.199.999,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 20.466.629,18 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 14.733.369,82
- Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Instalasi Permanen dan Bangunan Rumah Sakit Jiwa pada RS Jiwa Grhasia dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 32.500.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 13.327.805,00 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 19.172.195,00
- Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Sapi sebanyak 4 ekor dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 82.775.500,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 72.800.000,00 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 9.975.500,00
- Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 329.709.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 0,00 sehingga menghasilkan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 329.709.000,00.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂා විනිශ්චයකරුන්ගේ සේවයක් ලෙස කටයුතු කරනු ලබන ආරක්ෂක ජනරාල්වරුන්ගේ සේවයක් ලෙස

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.9. Beban Rp 1.412.373.353.076,44 Rp 1.439.696.778.388,13

Beban BPKA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.412.373.353.076,44 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2022. Beban tersebut terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp 110.136.768.046,49; Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 25.962.643.911,44; Beban Transfer sebesar Rp 1.276.265.566.587,51; dan Beban Tidak Terduga sebesar Rp 8.374.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.9.1. Beban Operasi Rp 110.136.768.046,49 Rp 164.551.448.794,11

Beban Operasi BPKA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 110.136.768.046,49 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 77.685.513.435,00; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 31.236.940.352,49; dan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp 1.214.314.259,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.9.1.1. Beban Pegawai Rp 77.685.513.435,00 Rp 129.044.649.565,00

Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 77.685.513.435,00. Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp 51.359.136.130,00) atau 39,80% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 129.044.649.565,00. Beban Pegawai BPKA Tahun Anggaran 2022 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.107
Rincian Beban Pegawai**

URAIAN	2022	2021
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	18.593.071.910,00	70.642.312.485,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.749.500.145,00	15.689.907.080,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.342.941.380,00	42.712.430.000,00
Jumlah (Rp)	77.685.513.435,00	129.044.649.565,00

3.1.9.1.2. Beban Barang dan Jasa Rp 31.236.940.352,49 Rp 28.866.361.684,11

Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2022 adalah sebesar Rp 31.236.940.352,49. Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.370.578.668,38 atau 8,21% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 28.866.361.684,11. Beban Barang dan Jasa BPKA Tahun 2022 merupakan kenaikan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2022 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 ආයතන විභාගනු ලබන මුදල් පාලන කොමසාරිස්වරුන්ගේ කාර්යාලය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.108
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	2022	2021
BEBAN BARANG DAN JASA		
Beban Barang	7.532.186.614,59	6.812.885.393,00
Beban Barang Pakai Habis	7.532.186.614,59	6.812.885.393,00
Beban Jasa	23.704.753.737,90	22.053.476.291,11
Beban Jasa Kantor	15.869.965.048,00	14.351.114.637,20
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.211.203.805,08	1.209.770.608,91
Beban Sewa Tanah	11.600.000,00	11.600.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	361.419.000,00	432.850.480,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	246.044.794,52	446.160.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	120.924.000,00	123.804.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	109.016.940,00	21.941.160,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.486.040.130,00	1.188.460.000,00
Beban Pemeliharaan Tanah	6.318.752.139,96	159.989.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.110.564.940,00	2.057.419.696,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.039.943.309,00	975.639.906,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000,00	29.912.500,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	30.000.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	(6.665.597.223,66)	-
Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	1.439.876.855,00	1.014.814.303,00
Jumlah (Rp) Beban Barang dan Jasa	31.236.940.352,49	28.866.361.684,11

- **Beban Barang Pakai Habis**

Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp 7.532.186.614,59 didapat dari beban dari mutasi keluar barang persediaan sebesar Rp 6.251.402.240,59 ditambah pengurangan beban mutasi persediaan antar unit sebesar (Rp 7.800.000,00) ditambah beban makanan dan minuman sebesar Rp 1.288.584.374,00.

- **Beban Jasa Kantor**

Beban Jasa Kantor sebesar Rp 15.869.965.048,00 didapat dari Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 16.058.000.816,00 ditambah pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp 202.338.436,00 dikurangi pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar (Rp 240.883.904,00) dikurangi kapitalisasi belanja ke Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar (Rp 149.106.300,00) serta dikurangi kapitalisasi belanja ke Aset Tetap sebesar (Rp 384.000,00) .

- **Beban Iuran Jaminan/Asuransi**

Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp 1.211.203.805,08 didapat dari Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 1.241.624.621,00 ditambah pembayaran Beban Dibayar Dimuka BPKA (induk) tahun 2021 sebesar Rp 656.724.864,73 serta dikurangi pengakuan Beban Dibayar Dimuka BPKA (induk) tahun berjalan sebesar (Rp 687.145.680,66).

- **Beban Sewa Tanah**

Beban Sewa Tanah sebesar Rp 11.600.000,00 merupakan beban penyewaan tanah selama Tahun Anggaran 2022.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

- **Beban Sewa Peralatan dan Mesin**

Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 361.419.000,00 merupakan beban penyewaan berbagai peralatan dan mesin selama Tahun Anggaran 2022.

- **Beban Sewa Gedung dan Bangunan**

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 246.044.794,52 didapat dari Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 249.990.000,00 ditambah pembayaran Beban Dibayar Dimuka KPPD Kulon Progo dan KPPD Bantul tahun 2021 sebesar Rp 15.627.397,26 serta dikurangi pengakuan Beban Dibayar Dimuka KPPD Kulon Progo dan KPPD Bantul tahun berjalan sebesar (Rp 19.572.602,74).

- **Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 120.924.000,00 merupakan beban penyewaan sewa tanaman selama Tahun Anggaran 2022.

- **Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp 109.016.940,00 merupakan beban atas Jasa pembuatan Peta sebesar Rp 13.279.440,00 dan Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan sebesar Rp 95.737.500,00 selama Tahun Anggaran 2022.

- **Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp 1.486.040.130,00 didapat dari Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp 1.779.446.130,00 dikurangi kapitalisasi belanja ke Aset Tetap sebesar (Rp 158.500.000,00) dikurangi kapitalisasi belanja ke Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp 134.906.000,00)

- **Beban Pemeliharaan Tanah**

Beban Pemeliharaan Tanah sebesar Rp 6.318.752.139,96 merupakan beban atas pemeliharaan tanah untuk bangunan perumahan atau gedung tempat tinggal selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 248.968.000,00 ditambah beban untuk mengeluarkan aset tetap ekstrakomtabel sebesar Rp 248.968.000 ditambah beban atas penghapusan aset tetap berupa tanah sebesar Rp 6.059.959.143.

- **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.110.564.940,00 didapat dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.130.804.940,00 dikurangi reklasifikasi ke persediaan sebesar (Rp 20.240.000,00).

- **Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.039.943.309,00 merupakan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.549.041.609,00 dikurangi kapitalisasi belanja ke Aset Tetap sebesar (Rp 509.098.300,00).

- **Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 45.000.000,00 merupakan beban atas pemeliharaan jaringan listrik selama Tahun Anggaran 2022.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආකර්ම විකේතලයකරු පාලන කොමිෂන් සභාව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

• **Beban Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud**

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebesar (Rp 6.665.597.223,66) merupakan beban yang dicatat sebagai tindak lanjut atas Koreksi BPK karena adanya pengakuan defisit penjualan Aset Tetap Tidak Berwujud berupa Lisensi dan Franchise.

• **Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah**

Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp 1.439.876.855,00 merupakan beban atas perjalanan dinas dalam daerah selama Tahun Anggaran 2022.

3.1.9.1.4. Beban Hibah

Rp 0,00

Rp 6.594.865.625,00

BPKA tidak mengakui adanya Beban Hibah per 31 Desember 2022 karena tidak terdapat hibah keluar OPD selama Tahun Anggaran 2022.

3.1.9.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Rp 1.214.314.259,00

Rp 45.571.920,00

Beban Penyisihan Piutang BPKA Tahun 2022 sebesar Rp 1.214.314.259,00 merupakan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp 5.691.400,00 ditambah Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 1.084.287.659,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.109
Rincian Beban Penyisihan Piutang

URAIAN	2022	2021
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.691.400,00	3.951.600,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	4.528.900,00	3.887.600,00
Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.162.500,00	64.000,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.084.287.659,00	41.620.320,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	751.367.750,00	11.249.800,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.076.212,50	3.049.230,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	331.843.696,50	27.321.290,00
Jumlah (Rp)	1.089.985.124,00	45.571.920,00



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
ආයතනික ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනික කළමනාකරණ සංවිධානය

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

3.1.9.2. Beban Penyusutan Rp 25.962.643.911,70 Rp 21.435.219.688,51

Beban Penyusutan BPKA sebesar Rp 25.962.643.911,70 merupakan pengakuan atas pemanfaatan aset tetap dan aset lainnya yang terjadi selama Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.110
Rincian Beban Penyusutan

URAIAN	2022	2021
BEBAN PENYUSUTAN		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.437.975.004,49	10.013.855.987,11
Beban Penyusutan Alat Besar	1.245.742.106,97	1.302.677.075,16
Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.333.337.821,98	779.166.521,55
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	123.974.935,00	123.985.400,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	12.734.500,00	12.272.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.929.382.467,87	5.949.255.344,13
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	535.608.422,08	607.741.676,40
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.836.000,00	15.700.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	70.544.125,10	68.567.875,12
Beban Penyusutan Komputer	1.166.660.458,86	1.135.983.428,05
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	-	1.890.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	4.154.166,63	16.616.666,70

URAIAN	2022	2021
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.188.804.945,95	4.122.259.868,67
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	3.135.394.128,45	4.059.807.438,67
Beban Penyusutan Monumen	16.202.637,50	-
Beban Penyusutan Menara	606.000,00	-
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	36.602.180,00	62.452.430,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.287.586.749,04	6.169.102.433,29
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	980.424.509,90	892.519.494,26
Beban Penyusutan Bangunan Air	164.383.334,03	66.092.525,19
Beban Penyusutan Instalasi	27.063.979,08	577.945.184,70
Beban Penyusutan Jaringan	115.714.926,03	4.632.545.229,14
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	213.026.930,52
Beban Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi	-	213.026.930,52
Beban Penyusutan Aset Lainnya	9.048.277.212,22	916.974.468,92
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	9.048.277.212,22	916.974.468,92
Jumlah (Rp)	25.962.643.911,70	21.435.219.688,51

3.1.9.4. Beban Transfer Rp 1.276.265.566.587,51 Rp 1.249.746.537.055,51

Beban Transfer BPKA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.276.265.566.587,51 merupakan Beban Bagi Hasil sebesar Rp 821.949.914.868,00 yang didapat dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 839.016.298.042,00 ditambah pengakuan Utang Bagi Hasil Pajak tahun berjalan sebesar Rp 7.642.090.532,00 dikurang pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar (Rp 24.708.473.706,00) dan Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp 454.315.651.719,51 dengan rincian sebagai berikut:



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Tabel III.111
Rincian Beban Transfer

URAIAN	2022	2021
BEBAN TRANSFER		
Beban Bagi Hasil	821.949.914.868,00	716.105.738.931,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	679.785.910.641,00	589.570.957.630,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	142.164.004.227,00	126.534.781.301,00
Beban Bantuan Keuangan	454.315.651.719,51	533.640.798.124,51
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	-
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	352.767.994.612,32	484.644.483.000,29
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	100.547.657.107,19	48.996.315.124,22
Jumlah (Rp)	1.276.265.566.587,51	1.249.746.537.055,51

3.1.9.5. Beban Tidak Terduga Rp 8.374.531,00 Rp 3.963.572.850,00

Beban Tak Terduga BPKA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 didapat dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5.735.041.553,00 dikurang pemindahan beban tidak terduga ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp 5.726.667.002,00). Saldo sebesar Rp 8.374.531,00 adalah pengembalian pendapatan setoran laba BUKP Tahun 2021 Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul karena kesalahan pelimpahan Bank BPD DIY.

3.1.9.6. Defisit Non Operasional-LO Rp 5.758.844.097,66 Rp 1.382.124.860,82

Defisit Non Operasional-LO BPKA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 619.920.633,94 merupakan defisit dari penjualan Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penjualan BMD berupa Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, dan Barang Persediaan Berbahan Kertas) dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 70.713.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 4.531.029.933,66 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 4.460.316.933,66
- Penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya di Jl. Panembahan No. 20, Kraton, Yogyakarta dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 127.777.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 594.700.000,00 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 466.923.000,00
- Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Domba sebanyak 11 ekor dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 12.750.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 48.630.190,00 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 35.880.190,00
- Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen pada SMAN 1 Dlingo dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 12.100.000,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 91.669.779,00 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 79.569.779,00
- Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dengan Nilai Penjualan sebesar Rp 683.413.126,00 dan Nilai Buku sebesar Rp 1.399.567.321,00 sehingga terdapat Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp 716.154.195,00.

3.1.9.7. Surplus/Defisit LO Rp 4.159.867.712.583,22 Rp 5.057.308.684.453,06



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂක ව්‍යවස්ථාපන කමිටුව
பாதுகாப்பு வ්‍යවස්ථාපන කමිටුව

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Surplus/Defisit LO sebesar Rp 4.159.867.712.583,22 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp 5.577.379.989.123,38 dikurangi Beban-LO sebesar (Rp 1.412.373.353.076,44) ditambah dengan Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 619.920.633,94 dikurangi Defisit Non Operasional-LO sebesar (Rp 5.758.844.097,66). Surplus/Defisit LO BPKA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp 897.440.971.869,84) atau (17,74%) dari tahun 2021 sebesar Rp 5.057.308.684.453,06.

3.1.9.8. Laporan Perubahan Ekuitas Rp 3.387.355.288.460,40 Rp 3.156.556.769.719,74

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas BPKA Tahun Anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.112
Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	3.156.556.769.719,74	3.235.468.657.069,03
Surplus/Defisit LO	4.159.867.712.583,22	5.057.308.684.453,06
RK PPKD	(3.953.446.386.847,85)	(4.867.801.675.261,86)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	24.377.193.005,29	(268.418.896.540,49)
Ekuitas Akhir	3.387.355.288.460,40	3.156.556.769.719,74

3.1.9.8.1. Ekuitas Awal Rp 3.156.556.769.719,74 Rp 3.235.468.657.069,03

Ekuitas Awal BPKA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp 78.911.887.349,29) atau (2,44%) dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.235.468.657.069,03.

3.1.9.8.2. Surplus/Defisit LO Rp 4.159.867.712.583,22 Rp 5.057.308.684.453,06



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Surplus/Defisit LO BPKA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp 897.440.971.869,84) atau (17,75%) dari tahun 2021 sebesar Rp 5.057.308.684.453,06.

3.1.9.8.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Rp 24.377.193.005,29** **(Rp 268.418.896.540,49)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar BPKA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 24.377.193.005,29 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.113
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No.	URAIAN	2022
1	Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak dan Piutang Denda Pajak	10.418.150,00
2	Mutasi Masuk Aset Tetap dari OPD Lain	43.340.182.874,64
3	Mutasi Masuk Aset Tidak Berwujud dari OPD Lain	104.830.000,00
4	Appraisal Aset Sewa oleh PT Setia Mataram	63.520.599.000,00
5	Pengurangan Penyisihan Piutang TGR	1.250.000,00
6	Defisit Penjualan Aset	6.665.597.223,66
7	Penambahan Penyertaan Modal Metode Ekuitas dari Bagian Laba 2022	147.434.162.074,96

8	Koreksi Pengakuan Beban Penghapusan Aset Tetap yang Telah Direklas ke Aset Lain-Lain Secara Netto yang Sebelumnya Langsung Dicatat Sebagai Pengurang Ekuitas pada OPD	6.059.959.142,96
9	Koreksi Pengakuan Beban Penghapusan Piutang Denda yang Sebelumnya Langsung Dicatat sebagai Pengurang Ekuitas pada BPKA	124.335.200,00
10	Koreksi untuk Mengeluarkan Aset Extracom yang Diperoleh Tahun 2022 dari Belanja Modal (masuk ke beban, sebelumnya masuk ke Ekuitas)	9.824.997,00
11	Mutasi Keluar Aset Tetap ke OPD Lain	(71.299.341.597,56)
12	Mutasi Keluar Aset Tidak Berwujud ke OPD Lain	(29.000.000,00)
13	Penghapusan Aset Tetap	(6.059.959.142,96)
14	Aset Tetap Ekstrakompatibel	(9.824.997,00)
15	Penghapusan Piutang Denda Dana Bergulir BUKP	(124.335.200,00)
16	Penyesuaian Penyertaan Modal LK BUMD 2021 Audited	(11.260.077.271,79)
17	Pengurangan Penyertaan Modal Metode Ekuitas (Dividen)	(108.060.433.872,87)
18	Koreksi Pengakuan Beban Karena Adanya Defisit Penjualan Aset Tetap yang Semula Dicatat sebagai Pengurang Ekuitas pada BPKA	(6.665.597.223,66)
19	Koreksi Pengakuan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO karena Sebelumnya Penyisihan Piutang dari Pelunasan Piutang Dikurangkan dari Ekuitas	(1.250.000,00)
20	Koreksi Pengakuan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO karena Sebelumnya Penyisihan Piutang dari Pelunasan Piutang Dikurangkan dari Ekuitas	(10.418.150,00)
21	Penyesuaian Pendapatan LO karena Penyertaan Modal Metode Ekuitas	(39.373.728.202,09)
	Jumlah (Rp)	24.377.193.005,29



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦠꦏꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦤꦏꦺꦁꦸꦁꦠꦤ꧀ꦲꦱ꧀ꦠ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BPKA

Terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1974 s/d 1975, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan sampai tahun 1984, selanjutnya Biro Keuangan dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2009, pada saat itu BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekoinda Provinsi DIY. Kemudian namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi IY sejak 15 Februari tahun 2009 s.d tahun 2018 dan saat ini menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA).

Sejarah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 huruf (a) yang menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Struktur Organisasi BPKA adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum
 - b. Kelompok Substansi Program
 - c. Kelompok Substansi Keuangan
3. Bidang Anggaran Pendapatan
 - a. Subbidang Pajak Daerah
 - b. Subbidang Retribusi Daerah
 - c. Kelompok Substansi Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer
4. Bidang Anggaran Belanja
 - a. Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan
 - b. Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian
 - c. Kelompok Substansi Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana
 - d. Kelompok Substansi Anggaran Belanja Sosial Budaya
5. Bidang Pengelola Kas Daerah
 - a. Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan
 - b. Subbidang Pengelola Kas Perekonomian
 - c. Kelompok Substansi Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana
 - d. Kelompok Substansi Pengelola Kas Sosial Budaya
6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
 - a. Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦏꦏꦸꦁꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦢꦂ

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

7. Bidang Akuntansi
 - a. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan
 - b. Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian
 - c. Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana
 - d. Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya
8. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b. Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - c. Kelompok Substansi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Jabatan Fungsional.

Visi BPKA adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset terbaik se-Indonesia dengan misinya adalah sebagai :

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah
2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan profesionalisme SDM

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah dan akuntansi
2. Pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan
3. Melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang milik daerah

Sedangkan fungsi BPKA adalah:

1. Penyusunan rencana kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
3. Pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pendapatan transfer;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
8. Pengelolaan barang milik daerah;
9. Pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ආරක්ෂක සහ පාලන කමිටුවක් ලෙස පැවැත්වෙන බැංකු සහ අනෙකුත් ආයතන

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

12. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
14. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

**BAB V
PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 merupakan hasil konsolidasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran dengan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran) dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Untuk penyajian persediaan dan aset tetap di Neraca didukung dengan E-Persediaan dan SIM ASET milik Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

Perencanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦠꦤ꧀ꦥꦤꦒꦺꦭꦺꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦏꦺꦩ꧀ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀

Komplek Kepatihan Danurejan, Telp (0274) 562811 Ext. 1117 - 1122, Fax : (0274) 564544

 www.bpka.jogjaprov.go.id

 bpka@jogjaprov.go.id

 @bpkadiy

 bpkadiy

 bpkadiy